

**POTRET ABDUL MUKTI ALI DALAM MEDIA MASSA
TAHUN 1971-1978**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Adab dan Bahasa

UIN Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memproleh Gelar

Sarjana Humaniora (S.Hum)



Oleh:

ARUM APRILIANI

NIM 16.323.1010

PROGRAM STUDI SEJARAH PERADABAN ISLAM

FAKULTAS ADAB DAN BAHASA

UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA

2023

NOTA PEMBIMBING

Hal : Skripsi Sdr. Arum Apriliani
NIM : 163231010

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Adab
dan Bahasa
UIN Raden Mas said
Surakarta
Di Tempat

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca dan memberikan arahan dan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi sdr:

Nama : Arum Apriliani

NIM : 163231010

Judul : Potret Abdul Mukti Ali dalam Media Massa Tahun 1971-1978

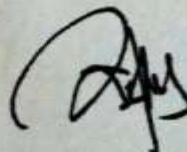
Telah memenuhi syarat untuk diajukan pada siding munaqosyah skripsi guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang Sejarah Peradaban Islam.

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Surakarta, 22 Mei 2023

Pembimbing




Latif Kusairi, S.Hum. M.A.

NIP. 19841025201801100

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul Potret Abdul Mukti Ali dalam Media Massa Tahun 1971-1978 yang disusun oleh Arum Apriliani telah di presentasi di depan Dewan Penguji Skripsi Fakultas Adab dan Bahasa UIN Raden Mas Said Surakarta pada Senin, 22 Mei 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Sejarah Peradaban Islam (S.Hum).


Penguji Utama : Dr. Nor Huda, M.Ag. M.A
NIP 19701114200003100

(.....)

Penguji I,
Merangkap Ketua : Irma Ayu Kartika Dewi, M.A
NIP 1988044302018012001

(.....)

Penguji II,
Merangkap Sekretaris : Latif Kusairi, M.A
(Pembimbing) NIP 198410252018011001

(.....)

Surakarta, 22 Mei 2023

Mengetahui,

Dekan Fakultas Adab dan Bahasa




Prof. Drs. Toto Suharto, S.Ag., M.Ag.
NIP 19710403 199803 1 005

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucap syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia, kekuatan, serta kemudahan, sehingga saya mampu menyelesaikan Skripsi ini. Dengan ini saya persembahkan karya saya yang jauh dari kata sempurna ini kepada orang yang saya sayangi :

Bapak/Ibu saya tercinta

Adek saya Wulan Ramadhani

Sahabat saya Resianita yang sudah membantu

Keluarga tercinta, Teman-teman alumni SPI 2016, Dosen Prodi Sejarah

Peradaban Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Pengurus Koran Kompas, Radya Putaka dll

MOTTO

Tidak ada kesulitan yang tidak ada ujungnya. Sesudah sulit pasti akan ada kebahagiaan. *“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.*

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

(QS Al-Insyirah: 5-6)

Tidak ada sesuatu yang mustahil untuk dicapai. Tidak ada sesuatu yang mustahil untuk diselesaikan. Karena *“Sesungguhnya Allah bebas melaksanakan kehendak-*

Nya, Dia telah menjadikan untuk setiap sesuatu menurut takarannya.”

(QS At-Thalaq: 3)

Ikatlah ilmu dengan menulis.

(Ali bin Abi Thalib)

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang Bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arum Apriliani

NIM 163231010

Program Studi : Sejarah Peradaban Islam

Fakultas : Adab dan Bahasa

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Potret Abdul Mukti Ali dalam Media Massa Tahun 1971-1978" adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi maka saya siap dikenakan sanksi akademik.

Surakarta, 22 Mei 2023

Yang Menyatakan,



Arum Apriliani

NIM 163231010

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Humaniora. Penelitian yang ditulis ini mengkaji tentang Potret Abdul Mukti Ali dalam Media Massa tahun 1971-1978. Dalam proses penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis baik langsung maupun tidak langsung. Maka dari itu, penulis ingin berterima kasih kepada pihak-pihak terkait, yakni kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Toto Suharto, S.Ag, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Adab dan Bahasa.
3. Bapak Latif Kusairi, S.Hum, M.A selaku Ketua Jurusan Studi Sejarah Peradaban Islam yang memberikan dukungan semangat kepada penulis agar mampu menyelesaikan skripsi ini serta selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, dukungan serta motivasinya kepada penulis sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
4. Ibu Martina Safitry, SS., M.A selaku Koordinator Program Studi Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab dan Bahasa.
5. Bapak Dr. H. Muh Fajar Shodiq, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Adab dan Bahasa dan selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu selama proses belajar di bangkuperkuliah.

6. Seluruh Staf Pengajar Jurusan Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Bahasa, IAIN Surakarta karena berkat pengajaran dan bimbingannya penulis dapat menyelesaikan studi ini dengan baik.
7. Seluruh Staf Tata Usaha dan Akademik yang telah memberikan bantuan untuk keperluan administrasi selama perkuliahan serta menyelesaikan penelitian ini.
8. Seluruh Staf Kompas yang telah membantu dalam pencarian data terkait penelitian ini.
9. Seluruh Staf Radya Pustaka yang telah membantu dalam pencarian data terkait penelitian ini.
10. Seluruh Staf Monumen Pers yang telah membantu dalam pencarian data terkait penelitian ini.
11. Orang tua tercinta yang selalu mendoakan dan memberi dorongan semangat dalam menyelesaikan kuliah serta keluarga penulis yang telah mendukung hingga penulisan skripsi ini selesai.
12. Teman-teman seperjuangan Sejarah Peradaban Islam angkatan 2016 yang telah menemani penulis selama ini dalam berproses di kampus dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
13. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini.

DAFTAR ISI

NOTA PEMBIMBING	i
PENGESAHAN	ii
PERSEMBAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISTILAH.....	xi
DAFTAR SINGKATAN	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Batasan Masalah	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
E. Tinjauan Pustaka.....	13
F. Kerangka Konseptual.....	16
G. Metode Penelitian	17
BAB II	21
BIOGRAFI ABDUL MUKTI ALI TAHUN 1923 – 2005	21
A. Latar Belakang Keluarga	21
B. Riwayat Pendidikan Abdul Mukti Ali	23
C. Masa Kinerja Abdul Mukti Ali saat Menjabat sebagai Menteri Agama Tahun 1971-1978	28
D. Karya-karya Mukti Ali	31
BAB III.....	34
KEBIJAKAN POLITIK ORDE BARU TERHADAP ISLAM MASSA MENTERI AGAMA MUKTI ALI	34
A. Kebijakan Politik Orde Baru Terhadap Organisasi Islam.....	34

B.	Kebijakan Politik Orde Baru Terhadap MUI	36
C.	Kebijakan Politik Orde Baru Terhadap Asas tunggal pancasila	36
D.	Kebijakan Politik Orde Baru Terhadap RUU Perkawinan	37
BAB IV	39
KEBIJAKAN MENTERI AGAMA ABDUL MUKTI ALI YANG TERPOTRET DI BERBAGAI MEDIA MASSA TAHUN 1971-1978		
A.	Kebijakan Abdul Mukti Ali dalam Bidang Pendidikan yang Terpotret di Media Massa	39
B.	Kebijakan Abdul Mukti Ali tentang Haji pada Tahun 1971-1978.	46
C.	Kebijakan Abdul Mukti Ali tentang Kerukunan Umat beragama .	52
D.	RUU Perkawinan.....	57
BAB V	60
KESIMPULAN	60
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN	65

ABSTRAK

Arum Apriliani, 2023, “Potret Abdul Mukti Ali Dalam Media Massa Tahun 1971-1978”. Skripsi Strata Satu (S1). Jurusan Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Bahasa, UIN Raden Mas Said Surakarta.

Penelitian ini menerangkan kembali tentang sosok Abdul Mukti Ali sebagai ingatan segar di era millennium sehingga memberikan semangat baru dalam menelaah kembali tujuan pendidikan di Indonesia. Fokus penulisan ini membahas pada siapa sosok Abdul Mukti Ali dalam dunia Pendidikan, pemikiran dan kebijakan saat Abdul Mukti Ali menjabat sebagai Menteri Indonesia di era milenium.

Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian sejarah, yakni Heuristik yaitu proses mencari data, kritik atau menyeleksi sumber sejarah, interpretasi yang merupakan menafsirkan data-data yang diperoleh, dan historiografi atau proses menuliskan. Dalam penulisan ini penulis menggunakan beberapa sumber yaitu koran sezaman dan sumber pendukung yang berkaitan dan buku yang membahas Mukti Ali.

Hasil dari penulisan ini menjelaskan biografi, pemikiran dan kebijakan Abdul Mukti Ali didasarkan pada konsep keilmuan yang dikenal dengan istilah *scientific-cum-doctrinaire*, konsep kebangsaan di kenal dengan istilah *agree in disagreement*, dan konsep kemanusiaan. Abdul Mukti Ali dalam lintas media massa ini akan lebih fokus pada saat masa beliau menjabat sebagai Menteri Agama dan pengaruh pemikiran terhadap pembaharuan masa orde baru.

Kata Kunci: Abdul Mukti Ali, Kebijakan , Media Massa.

DAFTAR ISTILAH

Fatwa	: Pendapat atau tafsiran suatu masalah
Fraksi	: Pendukung
Kompleks	: Himpunan kesatuan atau kelompok.
Lazim	: Sudah biasa, Sudah umum dilakukan.
Otoriter	: Tindakan yang berkuasa sendiri atau sewenang-wenang.
Rezim	: Tata pemerintahan negara atau pemerintahan yang berkuasa dan menguasai secara total.
Teokrasi	: Cara memerintah negara berdasarkan kepercayaan bahwa Tuhan langsung memerintah negara, Hukum Negara.
Ukuwwah	: Persaudaraan

DAFTAR SINGKATAN

ABRI	: Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
ADIA	: Akademi Dinas Ilmu Agama
Depag	: Departemen Agama
Depag	: Departemen Pembangunan
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
Golkar	: Golongan Karya
HMI	: Himpunan Mahasiswa Islam
HSBI	: Himpunan Seni Budaya Islam
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
IPKI	: Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia
IPM	: Indeks Pembangunan Manusia
K.H	: Kiai Haji
Menag	: Menteri Agama
MPRS	: Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
NU	: Nahdlatul Ulama
Parkindo	: Partai Kristen Indonesia
PARMUSI	: Partai Muslimin Indonesia
PDI	: Partai Demokrasi Indonesia
Perti	: Persatuan Tarbiyah Islamiyah
PGC	: Post Graduate Course
PKI	: Partai Komunis Indonesia
PLPA	: Pusat Latihan Penelitian Agama

PNI	: Partai Nasional Indonesia
PPP	: Partai Persatuan Pembangunan
PSII	: Partai Sarekat Islam Indonesia
PTAIN	: Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri
PUI	: Persatuan Ummat Islam
RIS	: Republik Indonesia Serikat
SKB	: Surat Keputusan Bersama
SPS	: Studi Pasca Sarjana

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2 1 Hollandsch Inlandsche School di Jawa	23
Gambar 2 2 Pondok Tremas.....	24
Gambar 2 3 UII (Universitas Islam Indonesia)	25
Gambar 2 4 Mc Gill	26
Gambar 2 5 Pelantikan Abdul Mukti Ali sebagai Menteri Agama tahun 1971	29
Gambar 4.1 Ibadah Haji 1971	47
Gambar 4 2 Kapal Laut yang membawa Jemaah Haji.....	48
Gambar 4.3 Pesawat Haji.....	49

DAFTAR LAMPIRAN

Koran Kompas 1	65
Koran Kompas 2	66
Koran Kompas 3	66
Koran Kompas 4	67
Koran Kompas 5	68
Koran Kompas 6	69
Koran Kompas 7	70
Koran Kompas 8	71
Koran Abadi 1	72
Koran Abadi 2	72
Koran Abadi 3	73
Koran Abadi 4	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan cara berpikir dalam masyarakat muncul pula berbagai pemikiran dalam memahami ajaran agama Islam baik itu yang tekstual maupun kontekstual, sekulari, pluralis dan sebagainya. Dengan itu, maka jarang dalam kehidupan bermasyarakat sering terjadi perbedaan pendapat mengenai ajaran agama Islam dan pengaplikasiannya dalam masyarakat. Semua itu menjadi sebuah warna yang unik dalam perkembangan keilmuan agama Islam dari masa ke masa sejak zaman Nabi sampai zaman modern seperti saat ini.

Sebagai salah seorang yang berpengaruh di Indonesia ia juga banyak memberikan kontribusi pemikiran dan pendapat pencerahan dalam ranah pemikiran agama Islam. Diantaranya juga ada berbagai pendekatan yang dipakai yaitu naqli (tradisional), aqli (rasional) dan kasyfi (mistis). Maka untuk menyikapi beberapa warna pemikiran ini perlu diadakan studi. Mukti Ali memberikan beberapa penawaran pemikiran agar dalam memahami ajaran agama Islam, umat tidak akan tersesat dan memahami ajaran agama Islam dengan benar. Mukti Ali dilantik menjadi Menteri Agama menggantikan K.H. Muhammad Dachlan Kabinet Pembangunan I. Kemudian diangkat lagi pada periode kedua (1973-1978) pada Kabinet Pembangunan II Orde Baru. Tak banyak yang mengetahui mengapa seorang yang tak berlatar belakang politik, dipercaya menjadi Menag.

Beberapa analisis, ditunjuknya Mukti Ali memimpin Departemen Agama adalah untuk melakukan pembaruan kebijakan. Dengan keahliannya di bidang ilmu perbandingan agama, dan keaktifan di forum antarumat beragama, ia dianggap kompeten. Ada beberapa masalah pokok yang harus diselesaikan oleh Mukti Ali saat menjadi Menteri Agama ;

Pertama, masalah pembangunan manusia seutuhnya, sebagaimana tugas dan perhatian utama Departemen Agama saat ia diangkat menjadi Menteri Agama. Hal ini terjadi setelah Depag tak lagi dijadikan obyek kepentingan partai atau golongan. Sampai-sampai Mukti Ali mendapat julukan “Menteri Manusia Seutuhnya”. Ada juga yang berhasil mengubah Depag sebagai “Departemen Pembangunan”.¹

Kedua, masalah kerukunan hidup umat beragama di Indonesia. Masalah ini sebenarnya telah dirintis oleh Menteri Agama sebelumnya dengan cara mempertemukan tokoh-tokoh agama, tetapi usaha tersebut belum berhasil. Mukti ali melanjutkan upaya tersebut dengan keahlian yang dimiliki, yaitu “Ilmu Perbandingan Agama”. Setidaknya sampai 1971, belum ada yang membarukan tentang hubungan antar umat beragama ini secara ilmiah dan terbuka. Dalam rangka memperkokohsuasana rukun antar umat beragama, dibentuklah Badan Musyawarah antarUmat Beragama. Badan ini berfungsi menyelesaikan masalah yang

¹Singgih Basuki, “*Pemikiran Keagamaan A.Mukti Ali*”.(Yogyakarta : Suka Press. 2013) hlm 13

muncul dalam kehidupan beragama, sehingga mewujudkan toleransi beragama.²

Ketiga, menegaskan Indonesia sebagai negara Pancasila. Ketika muncul polemik kenegaraan (politik), yakni kekhawatiran Indonesia antara menjadi negara sekuler atau sebaliknya negara teokratis. Kemudian dimunculkan penegasan posisi Indonesia sebagai negara Pancasila, yang bukan sekuler dan bukan pula teokratis.

Keempat, pendidikan intern umat Islam. Pada waktu itu, lulusan sekolah-sekolah agama tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi umum. Di samping aturannya yang tidak jelas, juga kemampuan pengetahuan siswa yang kurang. Pada periode ini, lahirlah Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri: Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri No. 037/U/1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah tanggal 24 Maret 1975. Keputusan pentingnya adalah ijazah Madrasah mempunyai nilai sama dengan ijazah sekolah umum, lulusan madrasah dapat melanjutkan setingkat atas pada sekolah umum, serta siswa madrasah dapat pindah ke sekolah umum setingkat.

² Mohammad Damami, *dalam Limah Tokoh IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, hlm.261

Kelima, peningkatan kualitas studi agama di IAIN, dengan melakukan pembenahan mutu tenaga pengajarnya dengan menyelenggarakan PGC (Post Graduate Course), SPS (Studi Pasca Sarjana) yang kemudian menjadi embrio Program Pascasarjana. Selain itu juga melakukan pengiriman dosen-dosen untuk belajar ke luar negeri. Untuk mengembangkan penelitian agama, maka dibuka PLPA (Pusat Latihan Penelitian Agama).

Ketujuh, peningkatan kualitas sumber daya manusia di pesantren. Berangkat dari keprihatinan nasib kehidupan pesantren yang hanya focus mempelajari ilmu-ilmu agama Islam dalam makna sempit. Mereka tidak diajarkan pengetahuan umum sebagai bekal di masyarakat. Abdul Mukti Ali berupaya mengangkat martabat pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam dengan memasukkan pengetahuan umum, keterampilan, dan teknologi dalam kurikulum pesantren. Berbagai keterampilan tersebut antara lain: perikanan, pertanian, pertukangan, perbengkelan, dll.³

Kedelapan, menyelesaikan polemik RUU Perkawinan, hingga akhirnya disahkan. Mukti Ali diberikan tugas untuk mempelajari RUU perkawinan, karena itu orang yang paling bertanggung jawab baik di mata pemerintah maupun umat Islam. Agama dan Pembangunan Menurut Taufik Abdullah, Menteri Agama pada masa Orde Baru memiliki tiga tugas utama. Pertama, menjadi juru bicara pemerintah kepada umat Islam, disamping juga membela kepentingan umat Islam. Kedua, bertanggung

³ *Ibid.*, hlm 89

jawab terhadap berlangsungnya hubungan antarumat beragama yang harmonis. Ketiga, sebagai pemimpin masyarakat Islam dalam upaya bersama meningkatkan kualitas pendidikan dan intelektualitas umat. Departemen Agama identik dengan aspirasi keagamaan Islam dan dikenal sensitif dengan isu modernisasi.⁴

Menteri Agama Abdul Mukti Ali. Sosok intelektual Muslim yang visioner, pluralis dan sangat menghargai ilmu. Banyak julukan yang disematkan kepada A. Mukti Ali seperti “Penggagas Kerukunan Umat”, atau “Bapak Kerukunan Antaragama”, “Bapak Ilmu Perbandingan Agama” Sekembali dari Kanada tahun 1957 sampai diangkat menjadi Menteri Agama pada 11 September 1971, Mukti Ali bekerja di Departemen Agama dan mengajar di Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) Yogyakarta, yang kemudian menjadi IAIN dan kini UIN Sunan Kaligaja. Puncak karir akademiknya diraih saat dikukuhkan menjadi Guru Besar Ilmu Agama di kampus ini.⁵

Abdul Mukti Ali memiliki tugas berat, yakni mengubah pandangan keagamaan umat beragama untuk melancarkan program-program modernisasi Orde Baru. Fokus pemikirannya mencakup konteks kemanusiaan, keilmuan dan kebangsaan. Dalam konteks kebangsaan, kondisi bangsa yang pluralistik yang rentan dengan konflik antaragama,

⁴ *Ibid.*, hlm 160

⁵ Abdurrahman, Burhanuddin Daya, Djam’annuri (ed.), *Agama dan Masyarakat; 70 tahun H.A. Mukti Ali* (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press,1993), hlm 31

Abdul Mukti Ali mengemukakan konsep kerukunan intra dan antarumat beragama dengan prinsip agree in disagreement. Dalam konteks keilmuan, ia mengembangkan pendekatan scientific-cum-doctrine, yang memadukan antara normative dan empiris dalam memahami agama. Dalam konteks kemanusiaan, Mukti Ali berhasil memantapkan posisi Agama dalam pembangunan nasional. Yang dikenal sebagai “Pembangunan Manusia Seutuhnya”.⁶

Mukti Ali dikenal sebagai cendekiawan islam di Indonesia dan internasional. Ia telah menyumbangkan pemikirannya lewat pendidikan umum dan khususnya untuk Ilmu Perbandingan Agama. Ilmu Perbandingan Agama merupakan minat pertamanya dalam dunia pendidikan. Sehingga ia mendapat gelar *bapak satu-satunya* dalam Ilmu Perbandingan Agama di Indonesia.⁷ Tujuannya dalam menekuni Ilmu Perbandingan Agama tidak lain agar umat manusia ikut serta bersama-sama dengan orang-orang yang mempunyai maksud baik, menciptakan dunia yang aman dan damai berdasarkan etika, moral, serta agama, bebas dari ancaman rudal dan nuklir yang akan membinasakan umat manusia itu sendiri.⁸ Sebelum munculnya pembaruan pemikiran dalam menumbuhkan sikap terbuka terhadap perbedaan, situasi intern umat islam Indonesia

⁶ *Ibid.*, hlm 264

⁷ Singgih Basuki, “*Pemikiran Keagamaan A.Mukti Ali*”.Yogyakarta : Suka Press 2013, hlm 15

⁸ *Ibid.*, hlm 16

diwarnai dengan pengajaran agama lebih terpaku pada fikih. Pengajaran agama hanya terbatas pada tokoh-tokoh tertentu.⁹

Tokoh yang menekankan pentingnya pemahaman keagamaan secara tepat dengan mengenalkan pendekatan yang bersifat *scientific-cum-doctinaire*, yaitu memadukan pendekatan normative dengan Historis, Sosiologi, Antropologis, Psikologis, Mukti Ali, bersama Harun Nasution, dianggap sebagai peletak dasar model pendekatan dalam study Islam yang berkembang di Indonesia pada umumnya. Ia tidak hanya fokus dalam Ilmu Perbandingan Agama saja, namun juga terjun dalam pemerintahan Indonesia.¹⁰ Abdul Mukti Ali menjabat sebagai Menteri Agama di Indonesia dalam situasi politik yang sedang mengalami pancaroba perpolitikan dan kebudayaan Indonesia. Mukti Ali berhasil melewati masa-masa sulit itu bahkan memberi sumbangan yang tidak kecil bagi konsolidasi Orde Baru dalam menjaga keutuhan Indonesia sebagai bangsa. Sebagai orang yang dipercaya memimpin Departemen Agama awal tahun 1970an, masa dimana Departemen Agama dengan aspirasi keagamaan Islam dikenal dengan sensitive terhadap isu modernisasi.¹¹

Mukti Ali harus mempersiapkan landasan bagi program-program modernisasi, karena tantangan ini Mukti Ali lalu mengadakan reorientasi

⁹ *Ibid.*, hlm 19

¹⁰ Mukti Ali, 2002 " *Ilmu Perbandingan Agama di Indonesia*", (Yogyakarta; Yayasan Nida) hlm 17

¹¹ Azra, Azyumardi; Umam, Saiful (ed). *Menteri-menteri Agama RI: Biografi sosial-politik/ Azyumardi Azra (ed.)*.-Jakarta: PPIM, 199. Hlm 271

dalam kebijakan pemerintah dibidang Politik dan Keagamaan. Disaat pemerintahan percaya bahwa “modernisasi” merupakan jalan terbaik bagi penyelesaian berbagai persoalan yang dihadapi Indonesia, beberapa pemimpin Muslim justru menolak. Umumnya mereka berpendapat, agenda modernisasi untuk mengakhiri sistem pemerintahan yang bersifat ideologis dan mengakhiri sistem kekuatan sebagai ideologi politik Indonesia.¹²

Masa awal konsolidasi kekuasaan Orde Baru, jabatan Struktural yang berhubungan dengan kebijakan strateis banyak diserahkan kepada golongan terdidik memiliki keahlian akademik di bidang tertentu, dengan keahliannya mereka menguasai kebijakan publik. Seiring dengan perkembangan cara berfikir dalam masyarakat muncul pula berbagai metode pemikiran dalam memahami ajaran agama Islam ada yang tesktual maupun kontekstual. Maka tak jarang dalam kehidupan bermasyarakat sering terjadi perbedaan pendapat mengenai ajaran agama. Pada Periode inilah banyak dampak perubahan di Indonesia, mulai dari wacana keagamaan yang diwarnai reorientasi, perumusan konsep negara modern yang cocok bagi kultur keagamaan Indonesia, pembaharuan pemikiran, dialog antar umat beragama, mordenisasi lembaga keagamaan hingga pembaruan kurikulum lembaga pendidikan agama.¹³

¹² *Ibid.*, hlm 295

¹³ Artikel Jurnal *Pemikiran Mukti Ali* oleh Elihami STKIP Muhamadiyah Enekrang 2018, hlm 19

Dalam sebuah peradaban, pemikiran menjadi salah satu aspek penting. Di mana peradaban tersebut bisa berkembang, dan juga sejauh mana peradaban itu berkembang. Jadi antara dua hal mempunyai ketertarikan yang cukup erat. Sebagai sebuah usaha untuk melakukan istoinbathi dari berbagai hukum yang ada dalam agama, dan ketertarikan antara usha manusia untuk mendekatkan diri kepada sang pencipta. Dan juga menimbang keterkaitan hubungan antara sesama manusia.

Dalam sejarah dikatakan, Islam sekarang berjalan selama 14 abad Hijriah lamanya. Selama kurun waktu tersebut umat Islam selalumengalami banyak tantangan, dewasa ini yang paling banyak diperbincangkan adalah keterbelakangan dan kegelapan mengenai ilmu pengetahuan modern serta kemajuan yang terdapat dalam masyarakat Islam itu sendiri yang disebabkan oleh paham fatalisme dan pemahaman yang keliru tentang Islam. Dari faktor tersebutlah para pemikir muslim berusaha mengerakkan umat Islam untuk memperbarui kehidupan dan caraberfikir yang terbelang dari perkembangan jaman. Adanyamodernsasi pemikiran para tokoh intelektual Muslim sedikit merangsang kembali rasa haus akan ilmu.¹⁴

Pengetahuan dan teknologi yang selalu berubah-ubah mengikutiera globalisasi ini. Bidang pemikiran merupakan yang paling banyak

¹⁴Akhmad Taufik, *Sejarah Pemikiran dan Tokoh Modernisme Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm 4

tersentuh sejak dimulainya misi pembaharuan ini salah satunya menyangkut tentang studi agama. Masuknya agama dalam kajian pembaharuan menjadi

langkah utama dalam menjawab tantangan jaman. Pembaharuan yang dimaksud bukan berarti merubah, ataupun merevisi nilai dan prinsip yang telah ada dalam islam dengan maksud agar mengikuti atau sesuai dengan perubahan zaman, akan tetapi lebih kepada menafsirkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar Islam untuk melihat kesesuaiannya dengan perkembangan zaman itu sendiri. Ahmad Jainuri yang dikutip dalam jurnal

Sejarah Pembaharuan Islam Indonesia di Era Modern menurutnya pembaharuan Islam yang terjadi di tengah masyarakat muslim dimanapun itu memiliki dasar yang kuat terhadap pengalaman dan sejarah kaum muslimin. Dalam beberapa dekade terakhir studi agama sebagai studi yang banyak tersentuh metodologinya semakin menarik perhatian banyak pihak tertentu. Dengan tatanan kehidupan modern yang semakin kompleks, studi tentang agama dipandang telah menjadi kebutuhan yang mutlak diperlukan.

Ia lahir di Desa Balun Sudagaran Cepu tanggal 23 Agustus 1923, memiliki nama kecil Soedjono (Sujono), namun sumber lain menyebutkan Boedjono (Bujono). Ia berasal dari keluarga berkecukupan, di usianya yang ke-8 Mukti Ali mulai bersekolah di sekolah milik Belanda dan juga secara bersamaan terdaftar sebagai siswa Madrasah Diniyah di Cepu. Setelah itu melanjutkan di Pondok Pesantren Termas Pacitan, dimulai dari sini wawasannya terhadap agama terbentuk. Hingga akhirnya ia

mendapatkan beasiswa dari Asia Foundation untuk melanjutkan studinya di McGill University. Maka dari itu penulis tertarik melakukan penelitian ini karena sosok Mukti Ali yang sangat menginspirasi dalam melakukan langkah-langkah strategisnya untuk pembaharuan pemikiran di Indonesia menjadi lebih baik seperti saat ini. Sehingga skripsi ini ditulis dengan judul: **“POTRET ABDUL MUTI ALI DALAM MEDIA MASSA TAHUN 1971- 1978”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, Mukti Ali berperan sebagai Menteri Agama dan Bapak satu-satunya Ilmu Perbandingan Agama di Indonesia, pemikiran dan kebijakan beliau juga berpengaruh untuk perubahan masyarakat Indonesia di bidang Politik, Agama dan Pendidikan.

Berdasarkan latar belakang diatas, perumusan masalah yang akan dikaji diantaranya :

1. Bagaimana Biografi intelektual Abdul Mukti Ali Tahun 1923-2005 ?
2. Bagaimana kondisi sosial politik orde baru pada masa Abdul Mukti Ali sebagai Menteri Agama Tahun 1971-1978 ?
3. Apa saja kebijakan-kebijakan yang dibuat Abdul Mukti Ali saat menjabat sebagai Menteri Agama ?

C. Batasan Masalah

Penulisan sejarah harus dibatasi dengan spasial dan juga temporal. Periodisasi sangat diperlukan agar runtut dan dapat dipahami. Periodisasi merupakan konsep sejarawan semata-mata suatu produk mental yang hanya ada didalam pikiran sejarawan. Periodisasi merupakan hasil pemikiran komparatif antara satu periode dengan periode lainnya. Realitas sejarah sesungguhnya terus berhenti tanpa henti, pembabakan waktu hanyalah konseptualisasi sejarawan.¹⁵

Dalam penelitian sejarah membutuhkan data atau sumber baik itu sumber tertulis ataupun sumber tidak tertulis. Dari berbagai sumber yang telah terkumpul dapat diseleksi dan disesuaikan kegunaannya. Batasan masalah ini diperlukan agar penulis tetap fokus pada masalah terkait. Dalam penulisan ini penulis akan membahas tentang Potret Abdul Mukti Ali dalam media massa terkait kebijakan-kebijakan yang dibuat tahun 1971-1978.

Batasan spasialnya adalah Masyarakat Indonesia karena pemikiran Mukti Ali sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Adapun pemilihan tahun 1971 sebagai batasan awal karena pada tahun 1971 Abdul Mukti Ali mulai menjabat sebagai menteri agama Indonesia. Tahun 1978 sebagai batasan akhir karena pada tahun tersebut Abdul Mukti Ali mengakhiri masa jabatannya sebagai menteri agama di Indonesia.

¹⁵ Kuntowijoyo, *Penjelasan Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008), hlm 19-

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini selain untuk mengetahui bagaimana Biografi, kebijakan Menteri Agama Mukti Ali, kondisi Sosial, Politik, Pendidikan, Ekonomi, Haji di Indonesia dan bagaimana pengaruh Mukti Ali pada masa ia menjabat sebagai Menteri Agama. Penulis juga menjelaskan dari awal Abdul Mukti Ali merintis hingga menjadi orang ternama di Indonesia.

Manfaat yang didapat dari penelitian ini yakni untuk memberi dan menambah wawasan khususnya masyarakat Indonesia tentang potret Abdul Mukti Ali dalam media massa dan kebijakan-kebijakan Abdul Mukti Ali.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian mengenai Abdul Mukti Ali sendiri sudah banyak dibahas dalam penelitian-penelitian sebelumnya namun yang membahas tentang Abdul mukti Ali dalam ranah media massa masih sangat sedikit. Untuk mendukung penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa sumber baik itu berupa sumber primer seperti data Koran sezaman maupun sumber sekunder berupa buku, jurnal, skripsi, koran, web dan artikel-artikel sebagai landasan berpikir. Sejauh ini, penelitian dan penulisan tentang peran Mukti Ali dalam pendidikan telah banyak dilakukan. Namun yang spesifik membahas tentang peran aspirasi Mukti Ali masih jarang. Beberapa buku, jurnal, skripsi, Koran yang mengaji tentang peran aspirasi

pemikiran Mukti Ali biasanya hanya menjelaskan secara singkat saja. Beberapa penulis yang mengupas tentang Mukti Ali diantaranya:

Pertama, Buku yang berjudul *Menteri-Menteri Agama RI Biografi Sosial-Politik* yang ditulis oleh Azyumardi Azza dan Saiful Umam. Buku ini berisi tentang menteri-mentri agama RI salah satunya adalah A. Mukti Ali dalam bidang politik maupun sosial.¹⁶

Kedua, Buku yang berjudul *Ilmu perbandingan agama di Indonesia* yang ditulis oleh A. Mukti Ali. Buku ini berisi tentang ilmu perbandingan agama menurut beliau.

Ketiga, Buku yang berjudul *Sejarah Pemikiran dan Tokoh Modernisme Islam* yang ditulis oleh Akhmad Taufik. Buku ini menjelaskan tentang sejarah pemikiran Abdul Mukti Ali dan tokoh-tokoh modernisasi Islam yang ada di Indonesia.

Keempat, “*Dalam Koran Kompas. Dialog Antar Agama Hendaknja Dimulai Dari Kampus. 21 Desember 1971.Hlm 2.*” Dalam koran tersebut menjelaskan tentang musyawarah antar agama yang dilakukan pada tahun 1968 di jakarrta gagal sebab diorganisir oleh pemerintah dan wakil politik sebab itu dialog ditiadakan oleh pemerintah.¹⁷

¹⁶ Azza, Azyumardi; Umam, Saiful.1998.”*Menteri-Menteri Agama RI Biografi Sosial-Politik*”.

¹⁷ Dalam:Koran Kompas. “*Dialog Antar Agama Hendaknja Dimulai Dari Kampus. 1971*”. hlm 2

Kelima, Halimah Dja'far, dengan jurnal “*Modernisasi keagamaan islam di Indonesia; Telaah Pemikiran Abdul Mukti Ali*”, *Kontekstualitas*, Vol.21, No.2, (2006). Dalam jurnal ini membahas tentang pemikiran modernisasi. Abdul Mukti Ali dalam merumuskan pemikirannya didasarkan pada kesadarannya sendiri terhadap sejarah panjang bangsa Indonesia dan sejarah panjang umat islam.

Keenam, Skripsi dari Ahmad Zahroni dengan judul *Konsep Pendidikan Islam Menurut A. Mukti Ali*. Skripsi dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan : Universitas Agama Islam Negeri Salatiga. Dalam skripsi ini membahas tentang konsep pendidikan dan pemikiran islam diindonesia.

18

Ketujuh, Skripsi dari Siti Kamnah dengan judul *Studi Agama Dalam Perspektif H.A Mukti Ali*. Skripsi dari fakultas Ushulludin : Institut Agama Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam skripsi ini membahas tentang studi agama dalam pemikiran perspektif menurut Mukti Ali.¹⁹

Kedelapan, Skripsi dari Fandi Ahmad Saiful Hadii dengan judul *Studi Hermeneutika Al-Qur'an A. Mukti Ali*. Skripsi ini dari Ushuludin dan Pemikiran Islam: Universitas Agama Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

¹⁸ Zahroni Ahmad.2016.”*Konsep Pendidikan Islam Menurut H.A Mukti Ali*” Skripsi dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan: Universitas Agama Islam Negeri Salatiga.

¹⁹Kamnah Siti.2003.”*Studi Agama Dalam Perspektif H.A Mukti Ali*” Skripsi dari fakultas Ushulludin : Institut Agama Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam skripsi ini membahas tentang pembelajaran dan pemikiran hermeneutik menurut Mukti Ali.²⁰

Kesembilan, Almunawir Bin Rusli, dengan jurnal yang berjudul “Mukti Ali dan Tradisi Pemikiran Agama di Indonesia” *Potret Pemikiran*, Vol. 23, No. 1, (2019). Fokus Pembahasan dalam jurnal ini lebih ke sejarah agama dan kedudukan agama sebagai obyek kajian ditengah- tengah tradisi pemikiran yang terus mengalami pertumbuhan, yang kemudian dihubungkan dengan konsep pemikiran dari KH.Mukti Ali agar dapat menjadi kontrol dalam menciptakan sekaligus menyebarluaskan harmoni dan kestabilan negara dan bangsa

F. Kerangka Konseptual

Penelitian ini menitikberatkan pada pendekatan sejarah intelektual. Sejarah adalah suatu kejadian atau peristiwa yang hanya terjadi sekali dan di uraikan berdasarkan rangkaian fakta-fakta yang saling berkaitan.²¹ Sejarah Intelektual adalah sejarah mempelajari etos, jiwa, ide, atau nilai-nilai yang mempengaruhi kehidupan manusia atau masyarakat bahkan bangsa dan negara, dari zaman dulu hingga sekarang. Sejarah Intelektual dalam bahasa Sartono Kartodirdjo adalah mencoba

²⁰Fandi Ahmad Saiful Hadii.2016.”*Studi Hermeneutika Al-Qur’an A. Mukti Ali*”Skripsi dari Ushuludin dan Pemikiran Islam : Universitas Agama Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

²¹ Sartono Kartodirdjo, *Pemikiran Dan Perkembangan Historiografi Indonesia: Suatu Alternatif Sartono Kartodirdjo* (Jakarta: Gramedia, 1982), hlm 12

mengungkapkan latar belakang sosio-kultural para pemikir, agar dapat mengungkapkan latar belakang sosio-kultural yang mempengaruhinya.²²

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), dan apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya maka ia menjalankan peranan. Menurut Riyadi, peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Sutarto mengemukakan bahwa peran terdiri dari tiga komponen, diantaranya konsep peran, kepercayaan seseorang tentang apa yang dilakukan dengan situasi tertentu. Harapan peran, harapan orang lain terhadap seseorang yang menduduki posisi tertentu mengenai bagaimana ia seharusnya bertindak. Pelaksanaan peran, perilaku sesungguhnya dari seseorang yang berada pada suatu posisi tertentu.²³

G. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian sejarah dan metode yang digunakan yaitu metode penelitian kepustakaan yaitu metode yang teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Menurut

²² Leo Agung, *Sejarah Intelektual*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), hlm 2

²³ *Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon*. Jurnal administrasi publik, Vol 04 No. 048, hlm 2

Kuntowijoyo, metode sejarah memiliki lima tahapan penelitian, diantaranya:

Pertama, Pemilihan Topik, merupakan langkah awal dalam melakukan suatu penelitian sejarah. Pemilihan topik hendaknya dipilih sesuai dengan kedekatan emosional dan kedekatan intelektual sejarawan, karena, apabila sudah didasari dengan rasa senang dan juga sudah mempunyai bekal intelektual yang sesuai dengan topik yang dipilih, maka akan mempermudah proses penelitian dan peneliti akan berkerja dengan baik.

Kedua, Heuristik, yaitu proses mencari data serta mengumpulkan sumber- sumber ataupun data-data yang diperlukan. Penelitian ini menggunakan sumber, baik buku, arsip-arsip penting, foto-foto, koran maupun majalah, baik yang terbit pada tahun terkait maupun sesudahnya. Contohnya seperti, Koran Kompas, jurnal ilmiah, dan sebagainya. Pencarian sumber penulisan dilakukan di Arsip dan Perpustakaan Monumen Pers Nasional Surakarta, Perpustakaan Daerah Sragen, Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Selain itu penulis juga mencari sumber lain dari internet seperti e-book, jurnal, skripsi hingga artikel yang terkait sebagai sumber pendukung lainnya.

Ketiga, Verifikasi (Kritik Sumber) yaitu teknik atau tahap selanjutnya setelah melakukan pengumpulan sumber yang diperlukan. Dalam tahap ini sumber yang telah diperoleh perlu di verifikasi untuk mendapatkan keabsahannya, berupa keaslian sumber tersebut melalui

suatu kritik. Kritik sendiri adalah suatu proses menganalisa data secara kritis.²⁴ Kritik sumber sendiri ada dua, yaitu kritik ekstern dan kritikintern. *Kritik Ekstern*, yaitu langkah yang diambil untuk memproses atau menyeleksi data yang dilihat dari luar (fisik) mengenai sumber-sumber sejarah yang telah didapatkan. Semua ciri-ciri dari sumber sejarah yang diperoleh harus memiliki nuansa yang berkaitan dengan tema yang diangkat. *Kritik Intern*, yang mana kegiatan ini merupakan proses seleksi terhadap inti dari sumber-sumber sejarah yang telah melewati kritik ekstern. Langkah selanjutnya dipilih sumber sejarah yang sesuai dengan bahan kajian penelitian.

Keempat, Interpretasi atau penafsiran juga sering disebut analisis sejarah, analisis berarti menguraikan dan secara terminologis berbeda dengan sintesis yang berarti menyatukan. Analisis sejarah adalah menguraikan sumber-sumber atau data-data yang telah dikumpulkan, dikritik (ekstern dan intern), dibandingkan kemudian disimpulkan agar dapat dibuat penafsiran sehingga bisa diketahui kausalitas dan kesesuaian dengan masalah yang dibahas. Setelah dilakukan analisis, selanjutnya dilakukan sistesis sebagai penyatuan data yang telah diperoleh sesuai dengan kerangka penulisan. Menurut Kuntowijoyo, analisis dan sintesis merupakan metode utama dalam interpretasi.

²⁴Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah (Yogyakarta: Benteng Pustaka,1995),

hlm 82-85

Adapun terkait dengan penelitian ini proses interpretasi ini lebih cenderung menggunakan cara intrerpretasi analisis diamna menguraikan fakta satu persatu mengenai sejarah pemikiran Abdul Mukti Ali kemudian dikaitkan dengan beberapa perspektif lainnya sehingga nantinya dapat ditarik sebuah simpulan.

Kelima, Metode penelitian sejarah terakhir adalah historiografi, arti umumnya yakni penulisan sejarah berdasarkan pemeriksaan kritis terhadap sumber. Dengan historiografi merupakan tahap penyusunan dari hasil penelitian yang dilakukan, kemudian merekonstruksinya kembali dengan sumber-sumber yang terkait dengan penelitian.²⁵ Dalam penulisan sejarah paling tidak ada dua jenis bentuk penulisan menurut Sjamsuddin, menuntut pembuatan deskripsi serta narasi dan menuntut analisis kritis. Dari dua bentuk tersebut muncul yang kita kenal historiografi analitik kritis.²⁶

²⁵ Dudung Abdurahman, *Metode Penelitian Sejarah* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999) hlm 67

²⁶ Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah*, hlm 150

BAB II

BIOGRAFI ABDUL MUKTI ALI TAHUN 1923 – 2005

A. Latar Belakang Keluarga

Ada sebuah kota kecil yang bernama Cepu, Selama masa pemerintahan kolonial hingga awal abad ke 20. Kota Cepu tergolong dataran rendah yang memiliki hasil bumi antara lain kayu jati sebagai bahan komoditas ekspor ke luar daerah. Dengan demikian, komoditas kayu merupakan salah satu penghasilan yang dapat dikatakan cukup membanggakan untuk daerah Cepu.²⁷ Di samping komoditas kayu, daerah Cepu juga memiliki potensi alam lain yakni sumber minyak. Sumber minyak di Cepu diproduksi sejak sekitar tahun 1928. Selain kayu dan minyak terdapat satu komoditas lagi yang menjadi kebanggaan daerah Cepu yaitu tembakau. Tembakau yang dihasilkan juga tergolong cukup banyak sehingga dapat diekspor ke luar daerah. Masyarakat Cepu memanfaatkan tembakau sebagai usaha atau bisnis. Beberapa dari mereka bisa dikatakan sukses dari bisnis tersebut.

Di kota Cepu inilah Mukti Ali dilahirkan, tepatnya pada tanggal 23 Agustus 1923. Mukti Ali dilahirkan dari pasangan H. Abu Ali dan Hj. Khadijah. Mukti Ali anak kelima dari tujuh bersaudara.²⁸ Mukti Ali

²⁷ Muhammad Damami,dkk, *Lima Tokoh IAIN Kalijaga Yogyakarta* (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga,2000), hlm 218

²⁸ Ali Munharif, “*Prof.Dr.A.Mukti Ali;Modernisasi Politik-Keagamaan Orde Baru,*” dalam *Menteri-Menteri Agama RI Biograf Sosial-Politik*,ed.Azyumardi Azra dan Saiful Umam (Jakarta:Badan Litbang Agama RI,1998), hlm 273

memiliki nama kecil yaitu Boedjono, Boedjono kecil tinggal di desa Balun Sudagaran. Desa ini dahulu dikenal sebagai kompleks saudagar, Boedjono dikelilingi oleh suasana kehidupan perdagangan, baik ditengah-tengah keluarga maupun lingkungan tetangga-tetangganya. Suasana di desa ditandai dengan kehidupan yang serba guyub, akrab, lugas, saling menolong dan terlebih-lebih sifat sederhananya. Kesederhanaan inilah yang membekas dalam diri Mukti Ali.²⁹

Boedjono sangat bangga dengan nilai-nilai yang telah diperolehnya dari pengalaman di waktu kecil, seperti nilai pengalaman hidup di desa, nilai pengalaman hidup berdagang serta nilai pengalaman hidup tentang rasa keagamaan yang mendalam dan mendarah daging. Boedjono kerap kali memperoleh nasehat dari ayahnya, bahwa menjadi orang hendaknya jangan menjadi beban bagi orang lain akan tetapi diusahakan menjadi penolong bagi orang lain, jangan menjadi orang yang banyak berhutang budi pada orang lain, jangan menjadi orang yang jatuh miskin sebab kemiskinan sangat membatasi gerak hidup.³⁰

²⁹ Muhammad Damami,dkk, *Lima Tokoh IAIN Kalijaga Yogyakarta* (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga,2000), hlm 223

³⁰ *Ibid.*, hlm 223-224

B. Riwayat Pendidikan Abdul Mukti Ali

Pada usia delapan tahun, Mukti Ali menempuh pendidikan formalnya dengan masuk HIS (Hollandsch Inlandsche School), sekolah milik Pemerintah Hindia Belanda setingkat Sekolah Dasar. Di samping itu, ia juga mengaji (belajar agama Islam) di Madrasah Diniyah (Sekolah Islam) di Cepu, yang kegiatan belajarnya berlangsung sore harinya.³¹

Gambar 2 1 Hollandsch Inlandsche School di Jawa



Sumber : KITLV (diakses pada tanggal 23 Mei 2023)

Setelah menyelesaikan pendidikannya di HIS dan mendapat sertifikat pegawai pemerintah Belanda (Klein Ambtenar Examen), Mukti Ali melanjutkan dikirim ke Pondok Pesantren di Cepu untuk belajar al-Qur'an kepada KH. Usman.

³¹ Azyumardi Azra, Saiful Umam, *Menteri-Menteri Agama RI Biografi Sosial-Politik*, Jakarta : PPIM 1998, hlm 273

Di bawah asuhan KH. Usman yang terkenal tegas, Mukti Ali belajar membaca al-Qur'an dengan fasih dan tartil menurut kaidah ilmu tajwid. Pada pertengahan tahun 1940, Mukti Ali lalu dikirim ayahnya untuk belajar di Pondok Pesantren Tremas, Pacitan, di bawah asuhan KH. Dimiyati dan puteranya KH. Abdul Hamid Dimiyati. Ia intensif mempelajari berbagai kitab klasik seperti Nahwul Wadlih, Balaghatul Wadhihah, Jurumiyah, Alfiyah, Tqrib, Iqna', 'Mustalah Hadis', 'Jam'ul Jawami', dan lain-lain.³²

Gambar 2 2 Pondok Tremas



Sumber : <https://pondoktremas.com/cara-syekh-mahfudz-mengenalkan-tremas-pada-dunia/>

Di pesantren tradisional ini Mukti Ali mengaji di bawah asuhan kiai dan banyak belajar berdiskusi dengan para seniornya. Senior MuktiAli tersebut adalah KH. Abdul Hamid (asal Lasem yang kemudian

³² *Ibid.*, hlm 275

menetap di Pasuruan) dan KH. Ali Ma'sum (Rais Aam Syuriyah PBNU 1981-1984). Di Pesantren ini juga Mukti Ali bersama KH. Ali Ma'sum sempat merintis berdirinya madrasah, yang kemudian KH. Ali Ma'sum menjadi kepala sekolah dan Mukti Ali menjadi wakilnya. Setelah selesai belajar agama di Pesantren Tremas, Mukti Ali melanjutkan pendidikan agamanya di Pesantren al-Hidayah, Saditan, Lasem, Rembang di bawah asuhan KH. Ma'shum, ayah dari KH. Ali Ma'sum, sahabat dan gurunya di pesantren Termas. Meskipun kedua pesantren yang pernah ia singahi untuk belajar tersebut berbasis Nahdlatul Ulama, namun Mukti Ali tumbuhkan berkembang menjadi ulama intelektual dan ulama pembaharu yang berpengaruh. Ia menuntaskan pendidikan agamanya di berbagai pesantren.

Gambar 2 3 UII (Universitas Islam Indonesia)



Sumber : <https://www.republika.id/posts/20118/mahasiswa-iii-didorong-siap-mendesain-masa-depan>

Mukti Ali pergi ke Yogyakarta untuk melanjutkan pendidikannya di Sekolah Tinggi Islam (STI) yang saat itu baru saja berdiri. Ia memutuskan Fakultas Agama sebagai pilihannya. STI inilah yang kelak Ia sempat ikut terjun ke politik kala menjadi anggota Dewan Wakil Rakyat

Blora pada 1946. Tahun berikutnya ia kembali meneruskan belajar di Sekolah Tinggi Islam (STI) Yogyakarta, kelak jadi Universitas Islam Indonesia. Lagi-lagi studinya harus terhenti karena Agresi Militer Belanda kedua pada akhir 1948. Ia kemudian ikut bertempur dengan bergabung dalam Angkatan Perang Sabil pimpinan Kiai Abdurrahman dari Kedungbanteng).³³

Usai Revolusi mereda, Mukti Ali berniat meneruskan studinya yang terputus. Pada Maret 1950, ia berangkat ke Mekkah bersama adiknya untuk berhaji sekaligus belajar Islam. Namun sampai di sana, ekspektasinya tentang Mekkah buyar. Bagi Mukti Ali sendiri, Mekkah di tahun 1950 an itu ibarat desa besar dihiasi dengan pola kehidupan masyarakat abad pertengahan. Orang-orang yang hidup di Mekkah juga tidak mempunyai tingkat pendidikan yang lebih baik dari umumnya masyarakat Indonesia.

Gambar 2 4 Mc Gill



Sumber : <https://www.mcgill.ca/education/about/history>

³³ *Ibid.*, hlm 278

Ia lalu memutuskan pergi ke Pakistan dan mendaftar di Universitas Karachi. Pada 1955, Mukti Ali lulus sebagai sarjana spesialis sejarah Islam atas saran Anwar Harjono, mantan Sekjen Masyumi, ia kemudian pergi ke Kanada untuk meneruskan study di Institute of Islamic Studies, McGill University, Montreal. Semasa di McGill ia mulai mendalami metode studi agama-agama dan membangun pertemanan dengan profesor-profesor kajian Islam di universitas tersebut. Pada masa inilah pemahaman Mukti Ali tentang teologi Islam berkembang. Biangnya adalah Profesor Wilfred Cantwell Smith yang memperkenalkannya pada pendekatan komparatif dalam mempelajari Islam.³⁴

Lima tahun kemudian, Mukti Ali mampu menamatkan program tingkat sarjana mudanya sekaligus melanjutkan program Studynya di universitas yang sama. Pada bulan Agustus 1955, ia tiba di Montreal, Kanada, untuk melanjutkan belajarnya di Universitas Mc Gill dengan mengambil spesialisasi Ilmu Perbandingan Agama. Sebagai studynya yang terakhir pada tahun 1957, ia kembali ke Indonesia Mukti Ali mengabdikan diri sebagai dosen di IAIN Jakarta. Sesuai spesialisasinya, ia mengajar ilmu perbandingan agama.

³⁴ *Ibid.*, hlm 281

C. Masa Kinerja Abdul Mukti Ali saat Menjabat sebagai Menteri Agama Tahun 1971-1978

Dalam kariernya, Prof. Dr. KH. Abdul Mukti Ali Mukti Ali pernah menjabat sebagai Menteri Agama menggantikan K.H. Muhammad Dachlan Kabinet Pembangunan I. Kemudian beliau diangkat lagi pada periode kedua (1973-1978) pada Kabinet Pembangunan II Orde Baru.³⁵ Ketika Mukti Ali

memimpin Departemen Agama, posisi jabatan pemerintahan ini sudah begitu mantap didalam struktur pemerintahan Republik Indonesia. Bisa dikatakan, hampir tidak ada lagi kalangan masyarakat yang mempertanyakan, apalagi meragukan kehadiran dan fungsi Departemen Agama. Struktur organisasi juga lengkap dan dianggap lebih mewakili

kepentingan seluruh komunitas beragama. Langkah reorganisasi yang diprakarsai KH. Wahid Hasyim, Menteri Agama pada pemerintahan RIS dan Kabinet Natsir (1949-1953), dan berlanjut hingga KH. Mohammad Dachlan, susunan organisasi terus mengalami perubahan dan penambahan.³⁶

Mukti Ali di lantik menjadi Menteri Agama beberapa bulan setelah Pemilu, pada 11 September 1971. Ia menggantikan KH. Muhammad Dachlan, Mentri Agama dari NU pada Kabinet Pembangunan I 1968, yang belum habis masa jabatannya. Pergantian pemimpin di departemen agama terkesan begitu mendadak. Beberapa analisis

³⁵ *Ibid.*, hlm 284

³⁶ *Ibid.*, hlm 286

menyatakan, ditunjuknya Mukti Ali untuk pengantian pemimpin di departemen agama itu dimasukkan sebagai langkah Orde Baru untuk mengadakan restrukturisasi dan reorientasi kebijakan di departemen tersebut.

Gambar 2 5 Pelantikan Abdul Mukti Ali sebagai Menteri Agama tahun 1971



Sumber : Perpustakaan Nasional RI, Jakarta IPPHOS , 1971

Pemerintah Soeharto sangat menyadari potensi Umat Islam dalam menjang proses pembangunan dan modernisasi di Indonesia. Meski Indonesia bukan negara agama (teokrasi), tetapi pemerintah memiliki sebuah Departemen Agama. Hal pertama yang dilakukan Soeharto adalah mencari Figur yang tepat untuk memimpin dan membenahi Departemen Agama, yang merupakan mediator bagi pemerintah dalam menyampaikan program pembangunan dan modernisasi kepada umat beragama.³⁷

³⁷ Ali Munhanif, *Prof. Dr. A. Mukti Ali; Modernisasi Politik Keagamaan Orde Baru*, (Portal Kementrian Agama, 1997), hlm 293

Di awal Pemerintahannya Soeharto menyadari Departemen Agama masih di dominasi oleh kalangan tradisionalis, selain itu kebijakan Menteri Agama masih dipandang oleh pemerintah Orde Baru sebagai bagian dari Orde Lama yang terlalu bersifat politis. Keputusan Soeharto mengangkat Mukti Ali sebagai Menteri Agama di awal era pembangunan salah satunya didasari pertimbangan untuk mengakomodasi umat beragama agar berperan dalam menjalankan program pembangunan dan modernisasi di Indonesia. Pemerintahan Soeharto ingin Depag identik dengan aspirasi keagamaan Islam dan responsif terhadap isu-isu modernisasi. Dalam ide modernisasi keagamaan di Indonesia, Mukti Ali melihat ada tiga hal yang fundamental yang harus dihadapi; pertama, kerukunan umat beragama, maka menurutnya perlunya dikembangkan tradisi dialog antar agama; kedua, menjadikan agama sebagai landasan pembangunan nasional. Ia ingin membantah, baik dengan argumen akademis, maupun empirik, bahwa agama sesungguhnya adalah pendorong utama dalam proses pembangunan. Maka Mukti Ali mengusahakan agar pesantren bukan saja merupakan lembaga pendidikan, tetapi juga berfungsi sebagai lembaga produktif; ketiga, masalah kepemimpinan umat, Mukti Ali pun sebagaimana sering dikatakan "membedani" kelahiran Majelis Ulama Indonesia.³⁸

³⁸ *Ibid.*, hlm 295

Sebenarnya karir politik Mukti Ali di Departemen Agama RI tidak diawali dari kegiatan politik, tetapi dari dunia akademik. Sekembalinya dan Montreal, Canada, pada tahun 1957, Mukti Ali mengajar di Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA), di Jakarta, dan perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN), di Yogyakarta, yang keduanya kemudian menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN).

Sejak awal mengajar, Mukti Ali mulai memperkenalkan Ilmu perbandingan agama. Bagi masyarakat Muslim di Indonesia hingga 1950-an, mempelajari ilmu ini adalah suatu fenomena baru, termasuk di lingkungan pendidikan tinggi sekalipun. Ketekunan di dunia akademik membawa Abdul Mukti Ali pada posisi lain di lingkungan pendidikan tinggi. Sebelum menjabat Menteri Agama, ia adalah dosen tetap di Fakultas Ushuluddin, IAIN Sunan Kalijaga, selain itu ia pernah menjabat pembantu rektor III di tahun 1964, kemudian dipercaya menjabat pembantu rektor I, pada tahun 1968. Sebelum menjabat menteri, pada Oktober 1971, Mukti Ali dikukuhkan sebagai Guru Besar Ilmu Perbandingan Agama IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

D. Karya-karya Mukti Ali

Dalam rangka merealisasikan pemikirannya, guru besar Abdul Mukti Ali telah menuangkan idenya lewat buku, majalah, sambutan tertulis dan lain sebagainya. Adapun karyanya dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Pemberontakan Ahmad Uarabi dan Perjuangan Konstitusi di Mesir dan Gerakan Imam Mahdi di Sudan Yogyakarta: Media, 1969.
2. Ilmu Perbandingan Agama: Sebuah Pembahasan Tentang Metodos dan Sistema, Yogyakarta: yayasan Nida, 1965.
3. Keesaan Tuhan dalam Al-Qur'an, Yogyakarta: yayasan Nida, 1972.
4. Asal-Usul Agama, Yogyakarta: yayasan Nida, 1970.
5. Etika Agama dalam Pembinaan Kepribadian Nasional dan Pemberantasan Kemiskinan dari Segi Agama Islam, Yogyakarta; yayasan Nisa, 1971.
6. Masalah Komunikasi Ilmu Pengetahuan dalam Rangka Pembangunan Nasional , Yogyakarta, Yayasan Nida, 1971.
7. Dialog Antar Agama, Yogyakarta: Yayasan Nida, 2970.
8. Beberapa Masalah Pendidikan Agama di Indonesia, Yogyakarta: Yayasan Nida, 1971.
9. Faktor-Faktor Penyiaran Islam di Indonesia, Yogyakarta: Nida, 1971.
10. Relegion And Development in Indonesia, Yogyakarta: Nida, 1971.
11. Seni, Ilmu dan Agama, Yogyakarta: Yayasan Nida, 1972
12. Laboratorium Hisab dan Ru'yah.
13. Beberapa Persoalan Agama Dewasa Ini, Jakarta: Rajawali press, 1981
14. Ilmu Perbandingan Agama di Indonesia, Bandung: Mizan, 1988.

15. Muslim Bilali dan Muslim Muhajir di Amerika Serikat, Jakarta, 1990.
16. Ijtihad dalam Pandangan Muhammad Abduh, Ahmad Dahlan dan Muhammad Iqbal , Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
17. Ta'limul Muta'allim Versi Imam Zarkasyi, Suatu Pembahasan Perbandingan Tentang Metodologi Pendidikan Agama di Abad Pertengahan dan di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo.
18. Ensiklopedi Islam di Indonesia, 3 jilid (sebagai anggota dewan redaksi)
19. Metode Memahami Agama Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1991.
20. Memahami Beberapa Aspek Ajaran Islam, Bandung: Mizan, 1991.
21. Alam Pikiran Islam Modern di India dan Pakistan, Mizan, 1992.
22. Islam dan Sekularisme di Turki Modern, Jakarta: Djambatan, 1994.
23. Alam Pikiran Islam Modern: di Timur Tengah, Jakarta, 1995.
24. Ibnu Khaldun dan Asal Usul Sosiologi, Yogyakarta: Nida, 1997.
25. Agama dalam Pergumulan Masyarakat Kontemporer , Yogyakarta: Yayasan Nida, 1997.

BAB III

KEBIJAKAN POLITIK ORDE BARU TERHADAP ISLAM MASSA

MENTERI AGAMA MUKTI ALI

A. Kebijakan Politik Orde Baru Terhadap Organisasi Islam

Orde Baru³⁹ adalah tatanan seluruh perikehidupan rakyat, bangsa dan Negara Republik Indonesia yang diletakkan kepada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945. Orde Baru merupakan suatu reaksi dan koreksi prinsipil terhadap praktik-praktik penyelewengan yang telah terjadi pada masa lampau, yang lazim disebut zaman Orde Lama. Pengertian Orde Baru yang terpenting adalah suatu Orde yang mempunyai sikap dan tekad mental dan itikad baik yang mendalam untuk mengabdikan kepada rakyat, mengabdikan kepada kepentingan nasional yang dilandasi falsafah Pancasila dan yang menjunjung tinggi azas dan Undang-Undang Dasar 1945.⁴⁰ Masa Orde Baru berjalan dimulai pada tahun 1966 dimana Presiden Soekarno digantikan oleh Presiden Soeharto, hingga tahun 1998 yaitu saat Presiden Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden.

Masa kepemimpinannya banyak lobi-lobi politik yang dilakukan Soeharto. Salah satunya politik yang dilakukan terhadap Islam. Pada masa 10 tahun ia memimpin bisa dikatakan bersifat membatasi dan menindas terhadap aspirasi terhadap umat Islam. Kebijakan Soeharto dalam

³⁹ Nama Orde Baru digunakan untuk membedakan Pemerintahan Soeharto dengan pemerintahan sebelumnya. Pemerintahan Soekarno kemudian dikenal dengan Orde Lama.

⁴⁰ Cuplikan dari Pidato Pejabat Presiden Jendral Soeharto Kepada Sidang Kabinet AMPERA tanggal 19 April 1967.

menciptakan kestabilan NKRI pada zaman Orde Baru harus harus mengorbankan demokrasi dan hak-hak masyarakatnya, termasuk organisasi politik dan organisasi Islam. Organisasi Islam memiliki keterbatasan dalam melakukan pengembangan, setelah pemilihan umum 1971 Pemerintahan Orde Baru selanjutnya menawarkan penyederhanaan partai politik sehingga hanya terdapat 3 partai politik yang ada di Indonesia di lihat dengan meleburkan terhadap beberapa partai politik pada tahun 1973 yakni :

- a. Kelompok nasionalis (PNI, IPKI, Murba)
- b. Kelompok spiritual (NU, PMI Parmusi, PSSI, Perti, Parkindo dan Khatolik).
- c. Golongan Karya

Kelompok spiritual menjadi Partai Pembangunan Persatuan (PPP) dan kelompok nasionalis di sebut PDI.⁴¹

Kebijakan yang membatasi dan menyudutkan islam membuat umat islam bersifat oposisi terhadap pemerintahan. Masa ini fatwa-fatwa ulama mewajibkan umat islam memilih partai islam dalam pemilu. Dakwah yang di sampaikan dari tokoh agama islam sering berisi kritik-kritik terhadap pemerintah. Menanggapi ini pemerintah melakukan pembatasan aktivitas dakwah islam, sehingga muncul pertentangan umat islam dengan pemerintah kurang lancar. Akibatnya pemerintah kesulitan melakukan

⁴¹ Musyrifah Sunanto, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012). hlm 78

komunikasi dengan umat Islam, karena tidak ada organisasi Islam yang supportif terhadap pemerintah.⁴²

B. Kebijakan Politik Orde Baru Terhadap MUI

Tahun 1975, pemerintahan membentuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang memiliki fungsi yaitu: Pertama, mengeluarkan fatwa atau hukum serta nasehat baik terhadap pemerintah maupun masyarakat dalam rangka amar makruf nahi munkar dalam agama dan masalah sosial. Kedua, meningkatkan ukuwwah (persaudaraan) Islam serta agama-agama lain. Ketiga, mewakili umat Islam dalam komunikasi dengan pemeluk agama lain. Keempat, bertindak sebagai media komunikasi antara ulama dengan pemerintah, dan menyampaikan kebijakan pemerintah yang dapat di pahami masyarakat umum. Di lihat dari fungsi MUI bisa dikatakan sebagaipenyalar antara umat Islam dan pemerintah. Dengan adanya MUI sendiri sebagian pendapat bahwa MUI lebih dikontrol oleh pemerintah sehingga pada saat itu lebih mementingkan kepentingan pemerintah. Selain itu MUI dinyatakan sebagai wadah musyawarah yang diakui oleh pemerintah sehingga yang lainnya tidak dianggap sah.⁴³

C. Kebijakan Politik Orde Baru Terhadap Asas tunggal Pancasila

Setelah adanya penyerderhanaan partai serta berdirinya MUI. Soeharto juga menerakan asas tunggal Pancasila. Kebijakan pemberlakuan asas tunggal atau *political unifrom* di lakukan oleh Orde Baru melalui

⁴² Azyumardi Azra : Syaiful Umam (ed). *Menteri-Menteri agama dan RI: Biografi dan Politik* . (Jakarta:PPIM.1998), hlm 328

⁴³ *Ibid.*, hlm 329

pendekatan legalistik yang berawal dari ketetapan MPR RI Nomor 11/1983 yang di tulis dalam perundang-undangan Nomor 3 dan Nomor 8 Tahun 1985.⁴⁴ Dengan adanya keputusan ini baik organisasi masa maupun partai politik, semua harus mencantumkan pancasila sebagai asas mereka. Sehingga banyak organisasi masyarakat maupun partai politik yang merubah asas mereka yang sebagian berasas Islam kemudian menjadi berasas pancasila. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan organisasi mereka. Oleh karena itu bersamaan dengan ditetapkannya UU Asas Tunggal banyak dari mereka yang meninggalkan politik, dan hampir semua kelompok islam mau mengubah azas perjuangan oganisasinya dari islam menjadi Pancasila.

D. Kebijakan Politik Orde Baru Terhadap RUU Perkawinan

Setelah sepuluh tahun pertama pemerintahan Soeharto yang bisa dikatakan membatasi Islam, namun pada sepuluh tahun kedua hal itu berbanding terbalik. Pada masa sepuluh tahun kedua bisa dikatakan merupakan masa akomodatif antara Soeharto dengan Islam. Hal ini bisa dilihat dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Soeharto. Kebijakan itu diantaranya adanya RUU mengenai perkawinan yang berasaskan Islam. Kebijakan ini dikeluarkan pada masa kepemimpinan menteri agama bernama Mukti Ali. Dalam kepemimpinannya ada beberapa kebijakan yang kontroversial terutama bagi penganut agama islam yaitu UU Perkawinan tahun 1974 dan masalah Pendidikan Islam dan

⁴⁴ *Ibid.*, hlm 330

SKB 3 Menteri. Proses Penetapan UU perkawinan, membawa pemerintah Orde baru terutama kementerian agama dalam situasi politik yang mencekam dan mendapat penolakan keras terhadap RUU, dari umat islam baik dalam DPR maupun masyarakat luas. RUU Perkawinan yang diusulkan oleh Mukti Ali dan Oemar Senoadji.⁴⁵ Penolakan ini berdasarkan atas terdapat beberapa hal yang secara mendasar dipandang bertentangan dengan syariat islam tuduhan bahwa Mukti ali mendapat pengaruh dan berkonsiliasai dengan orang-orang kristen dan sekuler yang menginginkan de-islamisasi di negara Indonesia pun sempat terdengar karena formulasi dan proses politik pengajuan RUU menimbulkan kecurigaan. Tidak adanya konsultasi-konsultasi dengan pihak yang berkompeten misalnya dengan pemuka agama mengingat RUU ini berhubungan langsung dengan peribadatan umat islam.⁴⁶

⁴⁵ Muhammad Hisyam (peny), *Krisis Masa Kini dan Orde Baru*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003), hlm 344

⁴⁶ *Ibid.*, hlm 347

BAB IV

KEBIJAKAN MENTERI AGAMA ABDUL MUKTI ALI YANG

TERPOTRET DI BERBAGAI MEDIA MASSA TAHUN 1971-1978

A. Kebijakan Abdul Mukti Ali dalam Bidang Pendidikan yang Terpotret di Media Massa

Kebijakan Menteri Agama Abdul Mukti Ali terhadap Kemajuan Pendidikan Islam di Indonesia. Selama menjabat sebagai Menteri Agama, konsistensi Abdul Mukti Ali yang selalu di ungkapkan ketika memberikan ceramah di depan umat Islam adalah kesemarakan umat Islam dalam beribadah dan berpolitik tanpa di imbangi dengan kesibukan memikirkan masalah pendidikan umat. Ungkapan tersebut tidak bermaksud untuk menafikan berbagai bentuk upaya yang telah dilaksanakan kalangan umat islam, lewat program-program sosial dan kesejahteraan. Namun hal itu belum merupakan gerakan nasional yang melibatkan seluruh potensi umat Islam secara terprogram dan terencana. Masalah yang lebih memprihatinkan yaitu upaya tersebut belum menyentuh akar persoalan yang sesungguhnya, yaitu masalah pembenahan lembaga pendidikan Islam.

Ia meminta beberapa orang ahli dan praktisi pendidikan Islam untuk memprakarsai pembenahan lembaga pendidikan yang bernaungan dibawah departemen agama, seperti Madrasah, Pesantren dan Sekolah Agama. Prioritas terhadap lembaga pendidikan ini juga di landasi pada kenyataan bahwa, di lembaga pendidikan itulah sebagian besar masyarakat

muslim mempercayakan pendidikan putra-putrinya. Namun, setiap kali langkah pembenahan itu digariskan, pada saat itulah departemen agama menghadapi persoalan pelik yang sangat politis sifatnya, yaitu menyangkut posisi lembaga pendidikan Islam di dalam sistem pendidikan nasional. Memang sangat disadari hingga saat itu. Terdapat dualisme sistem pendidikan di Indonesia, yaitu pendidikan umum yang berada di bawah tanggung jawab departemen pendidikan dan kebudayaan, serta pendidikan agama yang berada dibawah hukum departemen agama.⁴⁷

Hal ini merupakan konsekwensi dari peristiwa-peristiwa politik yang terjadi setelah kemerdekaan, khususnya setelah terbentuknya suatu departemen yang secara tersendiri mengurus bidang agama, pada 13 januari 1946, yaitu kementerian agama. Dalam rumusannya tentang pendidikan Islam, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) melaporkan mengenai posisi pendidikan Islam sebagai berikut: Madrasah dan pesantren yang pada hakikatnya adalah suatu alat sumber pendidikan dan pencerdasan rakyat jelata, yang sudah berakar dalam masyarakat Indonesia umumnya, sehingga mendapat perhatian dan bantuan yang nyata dari pemerintah. Karena lembaga pendidika ini memberikan pendidikan agama, maka Abdul Mukti Ali dimasukkan dalam department agama. Mengikuti rumusan ini, bisa ditarik kesimpulan bahwa lembaga-lembaga pendidikan Islam itu, yang memang sudah ada sejak Indonesia belum

⁴⁷ Ali Munhanif, Prof. Dr. A. Mukti Ali; *Modernisasi Politik Keagamaan Orde Baru*, (Portal Kementrian Agama, 1997), hlm 306

merdeka, semestinya mendapat setatus formal. Sebagai lembaga pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah Indonesia. Tetapi, posisinya tetap berbeda dari lembaga pendidikan umum.⁴⁸

Abdul Mukti Ali juga memiliki gagasan yang terkait dengan pembaruan di IAIN juga digulirkan Abdul Mukti Ali. Ketika menjadi Menteri Agama, dalam berbagai forum yang terkait ia menggugat beberapa kelemahan IAIN, yakni dalam penguasaan bahasa asing selain Arab (khususnya Inggris), minat ilmu, dan metode menelitian ilmu Islam. Kelemahan pertama menyebabkan orang tidak dapat mengakses sumber Islam yang berasal dari bahasa Inggris. Padahal, sumber Islam yang berbahasa Inggris itu banyak sekali dan tersebar di negeri Eropa dan Amerika, sebagian juga ditulis oleh ilmuwan muslim. Selain itu, karena tidak menguasai bahasa Inggris, pikiran keislaman para sarjana dari Indonesia tidak bergaung di dunia Internasional: walaupun bergaung, hanya sebatas negeri yang berbahasa melayu. Untuk mengatasinya, Mukti Ali membangun pusat bahasa di setiap IAIN. Adapun untuk mengatasi kelemahan kedua dan ketiga, pintu belajar ke luar negeri, ke Timur Tengah dan Barat, juga dibuka lebar-lebar. Abuddin Nata dalam salah satu bukunya memuat empat poin penting terkait gagasan, pemikiran dan kebijakan Abdul Mukti Ali, khususnya yang terkait dengan pengembangan pendidikan Islam. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai kebijakannya

⁴⁸ Abdurrahman, Burhanuddin Daya, Djam'annuri (ed), *Agama dan Masyarakat; 70 Tahun H.A. Mukti Ali* (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Prees, 1993, hlm 31

sebagai berikut: Pertama, kebijakan tentang pembenahan lembaga pendidikan Islam. Upaya ini antara lain dilakukan dengan mengambil inisiatif dengan merembuk berbagai rencana itu dengan departemen lain, khususnya departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Setelah melalui proses panjang dan hati-hati, lahirlah surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri P&K dan Menteri Dalam Negeri, atau yang dikenal SKB tiga menteri, No.6 Tahun 1975, dan No. 037/U/a975. Dalam SKB tiga menteri tersebut ditegaskan: Pertama, agar ijazah madrasah dalam semua jenjang dapat mempunyai nilai yang sama dengan ijazah sekolah umum. Kedua, agar lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum setingkat dan lebih diatas. Ketiga, agar siswa madrasah dapat berpindah ke sekolah umum yang setingkat, maka kurikulum yang diselenggarakan madrasah harus terdiri dari 70% pelajaran umum, dan 30% pelajaran agama. Dengan demikian, pengakuan sosial lembaga pendidikan Islam di Indonesia di masa depan akan semakin bisa diperoleh.⁴⁹

Abdul Mukti Ali mengungkapkan; Langkah agar iklim belajar-mengajar di madrasa itu terbuka, tidak hanya belajar agama saja. Tetapi, ada juga pelajaran sejarah, ilmu bumi, matematika dan pelajaran umum yang lain, yang semua buku pegangan dan standart nilainya itu berada di bawah peraturan resmi pemerintah. Tidak dibiarkan liar, itu saja. Persoalan 70 % dan 30 % itu hanya ada dalam rumusan ide kita saja. Dalam

⁴⁹ *Ibid.*, hlm 35

praktiknyakan bagaimana kedua mata pelajaran itu saling mengisi. Itu saja yang disetujui oleh pak Syarif Thayb melalui kebijakan SKB inipaling kurang ada dua hal penting bagi masa depan pendidikan Islam di Indonesia. Pertama, dalam rangka integrasi pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional. Kedua, dengan memasukkan kurikulum pelajaran umum dalam jumlah jam yang besar, diharapkan pembenahan madrasah untuk ditransformasikan menjadi lembaga pendidikan Islam di masa mendatang semakin kuat.⁵⁰

Pertama, Kebijakan tentang modernisasi lembaga pesantren. Meskipun Abdul Mukti Ali menjaga kemandirian pesantren dengan mempertahankan sistem atau bahkan kurikulum yang sudah berjalan, keinginannya untuk membawa pesantren kepusat perhatian Orde Baru sangat besar.⁵¹ Melalui SKB Menteri Agama dengan Menteri Pertanian No. 34 A Tahun 1972, Mengadakan program bersama dengan Departemen Pertanian untuk mengadakan pembinaan pondok pesantren dalam bidang pertanian dan perikanan. Kerja sama itu juga dilakukan dengan departemen-departemen lain, ditujukan untuk memberi pembinaan material bagi pengelolaan lembaga pendidikan.⁵²

⁵⁰ Ali Munhanif, Prof. Dr. A. Mukti Ali; *Modernisasi Politik Keagamaan Orde Baru*, (Portal Kementrian Agama, 1997), hlm 312

⁵¹ Koran Abadi “*Presiden Menjetudjui Konsep-Konsep Pembaruan Pengadjaran Pondok-pondok Pesantren*”, Selasa 5 Oktober 1971, hlm 8

⁵² *Ibid.*, hlm 315

Kedua, Kebijakan tentang pembenahan IAIN. Segera setelah Departemen Agama mencanangkan perluasan pendidikan tinggi bagi umat Islam, sebagaimana tercantum dalam Repelita tahun 1969 -1973, umat Islam secara beramai-ramai entah atas nama yayasan agama, organisasi, pesantren atau pribadi, mendirikan IAIN. Menurut laporan Departemen Agama, disebutkan bahwa pada pertengahan tahun 1973, jumlah lembaga pendidikan tinggi Islam seIndonesia ada sekitar 112 IAIN, tersebar di seluruh pelosok tanah air. Ada yang di kota besar, dan ada juga yang di kota kecamatan, bahkan di pedesaan. Mempertimbangkan perkembangan ini, Abdul Mukti Ali kemudian meneliti kelayakan IAIN yang berjumlah besar itu. Hasilnya berdasarkan Keputusan Direktur Pembinaan Perguruan Tinggi Agama (Bimperta) No.32 Tahun 1975, dari 112 IAIN itu hanya 13, semuanya terdapat di kota provinsi, dan yang memenuhi syarat-syarat menjadi lembaga pendidikan tinggi agama, diberi izin untuk beroperasi. Selebihnya ditutup. Sementara IAIN yang berada di kota kabupaten, Cirebon, Serang, Malang, dan Mataram, yang dipandang memenuhi syarat dijadikan IAIN cabang yang secara administratif berada di bawah

Ketiga, Kebijakan peningkatan mutu IAIN. Kebijakan ini dilakukan dengan cara meningkatkan mutu tenaga pengajar di IAIN. Dalam kaitan ini, Departemen Agama mulai mengirimkan dosen-dosen untuk belajar ke luar negeri, antara lain Timur Tengah, Amerika Serikat, Belanda, dan Kanada. Menurut catatan Departemen Agama, hingga 1972, jumlah dosen IAIN dan pejabat Departemen Agama yang dikirim ke

Barat ada sekitar 55 orang. Dalam lingkungan di IAIN (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, pada periode 1973-1978 tercatat sebanyak 32 orang dosen dikirim untuk melanjutkan studi antara lain ke Australia 6 orang, Inggris 2 orang, Mesir 7 orang, Sudan 2 orang, Kanada 9 orang dan ke Belanda 8 orang. Dilain pihak, IAIN (sekarang UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta semenjak tahun 1973 telah dikirim sejumlah orang dosen untuk melanjutkan pendidikan.⁵³

Gagasan-gagasan dan kebijakan Abdul Mukti Ali terkait dengan lembaga pendidikan Islam khususnya seperti yang penulis uraikan di atas, sangat dipengaruhi oleh perjalanan intelektual dan kiprahnya dalam dunia pendidikan khususnya. Ia tidak hanya mencukupkan diri dengan berbagai kesibukannya di Departemen Agama, Mukti Ali juga menyempatkan dirinya mengajar di beberapa Perguruan Tinggi Islam baik swasta maupun negeri, seperti Perguruan tinggi Islam Negeri (PTAIN) di Yogyakarta dan Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA) Jakarta.⁵⁴

Abdul Mukti Ali juga mengajar di IAIN Jakarta, Universitas Islam Jakarta (UID), dan IKIP Muhammadiyah. Pada tahun 1960, ia diangkat menjadi sekretaris Fakultas Adab IAIN Jakarta sambil mengajar bahasa Inggris. Kemudian pada tahun 1961, oleh Prof. H. Muchtar Yahya, Dekan Fakultas Ushuluddin IAIN Yogyakarta, diminta membuka Jurusan Perbandingan Agama selain Jurusan Pendidikan dan Filsafat yang lebih

⁵³ *Ibid.*, hlm 317

⁵⁴ *Ibid.*, hlm 320

dulu ada di Fakultas Ushuluddin, dengan ketua jurusan A. Mukti Ali sendiri. Setelah Jurusan Perbandingan Agama dibuka dan mulai berjalan beberapa tahun, pada 1964, Abdul Mukti Ali dipindahkan ke IAIN Yogyakarta dan diangkat menjadi wakil Rektor III bidang Publik. Kemudian ia dipercaya sebagai pembantu Rektor I bidang akademik, tahun 1968. Di sela-sela kesibukannya sebagai wakil Rektor I dan beban mengajar di IAIN semakin banyak, Abdul Mukti Ali juga mengajar mata kuliah Timur Tengah Modern di Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Gadjah Mada dan IKIP Negeri Yogyakarta. Disamping itu, dia juga mengajar Ilmu Perbandingan Agama di Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI) Magelang, serta di Akademi Udara Adisucipto dan juga di SESKAU Bandung.⁵⁵

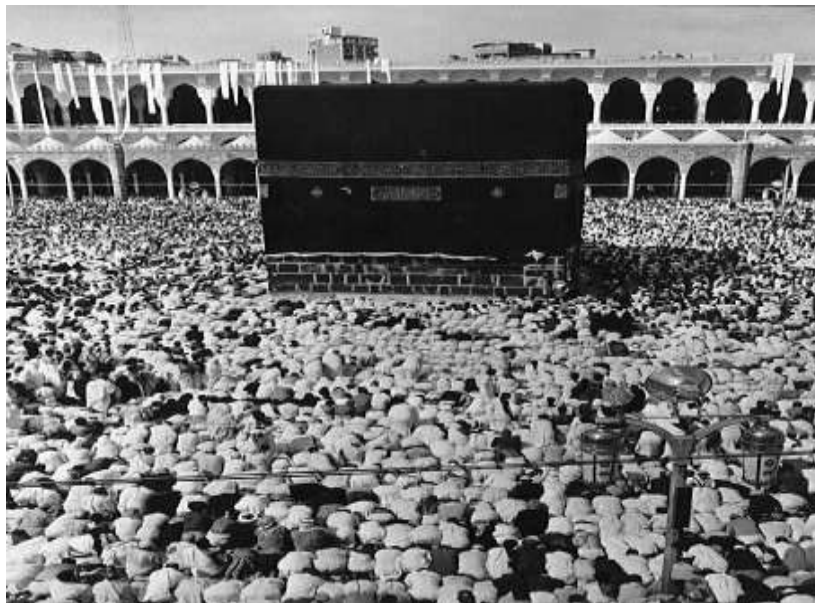
B. Kebijakan Abdul Mukti Ali tentang Haji pada Tahun 1971-1978

Haji, sejak tahun 1950 menjadi tonggak sejarah perjalanan ibadah haji Indonesia. Tahun ini merupakan permulaan penyelenggaraan ibadah haji yang di prakarsai sendiri oleh pemerintah Republik Indonesia Serikat (RIS). Paska pengakuan kedaulatan oleh pemerintah Belanda, Kementrian Agama yang waktu itu dijabat oleh K.H Wahid Hasim meletakkan beberapa dasar dalam kebijakan dari kementrian Agama RIS. Sejak itulah segala urusan mengenai ibadah haji diurus dan dilaksanakan oleh Kementrian Agama menggandeng yayasan PHI sebagai satu-satunya wadah yang sah untuk mengatur, melaksanakan dan mengawasi perjalanan

⁵⁵ *Ibid.*,. hlm 335

haji. Pemberangkatan ibadah haji yang pertama kali diprakarsai sendiri oleh pemerintah RIS, berhasil memberangkatkan sejumlah 9.933 jamaah haji. Tahun pertama dalam pemberangkatan ibadah haji yang diprakarsai oleh pemerintahan Indonesia saat itu belum banyak masyarakat Indonesia yang mendaftar menjadi calon jamaah haji. Sebagian masyarakat Indonesia pada tahun itu belum paham dengan ajaran agama Islam. Dari masa-kemasa masyarakat Indonesia mulai mengenal Agama pada tahun 1971 Indonesia terjadi peningkatan jumlah jamaah haji.

Gambar 4.1 Ibadah Haji 1971



Sumber : <https://www.gettyimages.com/photos/makkah-1971>

Meningkatnya jumlah jamaah haji Indonesia tahun ini disebabkan berbagai hal Abdul Mukti Ali mengatakan, bahwa hal itu disebabkan prosedur yang mudah dan keislaman yang makin kuat. Peningkatan itu juga merupakan indikator, pembangunan pertenak lembu dan petani cengkeh, sebagai perternak lembu sekarang cukup menjual lima atau enam

lembunya untuk ongkos naik haji. Pada zaman dahulu mereka harus menjual sekandang lembu. Petani cengkeh, cukup menjual 15 sampai 20 batang saja.

Gambar 4 2 Kapal Laut yang membawa Jemaah Haji



Sumber: Arsip Nasional Republik Indonesia

Jumlah jemaah haji Indonesia belakangan ini memang meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 1971–1972 masih sekitar 12.000 orang menjadi 22.000 orang pada tahun 1972. Pada tahun 1973-1974 jemaah haji yang terdaftar pada tahun ini mencapai 34.644 orang. Terdiri dari 16.000 haji laut dan 18.644 haji udara. Jumlah jemaah haji akan terus

bertambah.⁵⁶ Sebab, masih banyak daerah-daerah yang belum terdaftar dalam calon jamaah haji. Menurut Mukti Ali melonjaknya jumlah itu disebabkan naiknya pendapatan perkapita rakyat, meningkatnya kesadaran beragama dan fasilitas-fasilitas transportasi. Ia mengemukakan, untuk menampung jumlah yang begitu besar masih dipikirkan kemungkinan kota Medan sebagai tempat pemberangkatan haji udara, disamping Jakarta dan Surabaya yang telah berjalan selama ini.

Gambar 4.3 Pesawat Haji



Sumber: <https://internasional.republika.co.id/berita/ognx1i366>

Beberapa faktor yang mempengaruhi lapangan di Medan belum mampu menampung pesawat-pesawat jenis DC-8. Apalagi di tahun ini, Garuda mulai memakai pesawat-pesawat jumbo DC-10 untuk pengangkutan haji udara.⁵⁷

⁵⁶ Koran Kompas, *Jemaah Haji Indonesia Tahun Ini Terbesar di Dunia*, Jumat, 23 Agustus 1974 hlm 2

⁵⁷ Koran Kompas, *Sebab-sebab Meningkatnya Jumlah Jemaah Haji*, Selasa, 22 Mei 1973 hlm 2

Fasilitas lain yang adalah pembangunan gedung karantina di Jakarta yang mampu menampung 1.000 calon haji. Gedung ini sangat diperlukan, sebab selama ini calon haji masih menempatkan diri digedung lama DPR dan PHI. Pada tahun ini ongkos naik haji ditetapkan sebesar Rp.424.000 untuk kapal laut dan Rp.446.000 untuk pesawat udara. Mukti Ali menegaskan bahwa sekarang tidak ada lagi sistem kotum haji dan undian. Untuk musim mendatang, pemerintah akan menyediakan kesempatan untuk mengangkat sekitar 30.000 calon jamaah. Ketentuan tentang ONH tahun 1973-1974 ini dituangkan dalam Keputusan Presiden No 18 tahun 1973 yang ditetapkan pada 19 Mei. Besarnya ONH laut dan udara sudah termasuk uang bekal Rp.10.000 yang akan diberikan kepada jamaah sepulangnya dari tanah suci.⁵⁸

Pada tahun 1975-1976 jumlah jamaah haji mendatang tergantung fasilitas yang ada. Presiden Soeharto pada prinsipnya tidak membatasi jumlah calon jamaah haji. Namun sedikit banyaknya haji mendatang tergantung fasilitas yang tersedia di Saudi Arabia. Mukti Ali didampingi oleh Dirjen H.Burhani Tjokro Handoko melaporkan masalah haji kepada presiden. Menurut Mukti Ali, Pemerintah Indonesia bulan Maret ini akan mengirim team ke Saudi Arabia untuk mempelajari berbagai fasilitas yang diperlukan calon jamaah haji musim mendatang. Team akan menyelidiki

⁵⁸ Koran kompas, *ongkos haji laut Rp.424.000, udara Rp.446.000*, Selasa, 22 Mei 1973, hlm 2

jumlah penginapan yang disediakan oleh para Syeh setempat, berupa air minum, kendaran, penerangan. Ini semua guna meningkatkan pelayanan terhadap para jamaah haji Indonesia.⁵⁹ Menteri Agama mengungkapkan perjalanan ketanah suci untuk para jamaah haji dari Jawa, Madura, dan Sumatera, untuk musim haji mendatang diatur dengan menggunakan pesawat udara. Sedangkan jamaah dari daerah-daerah lain ditentukan akan menggunakan kapal laut. Sampai akhir Juni jumlah jamaah haji Indonesia terdaftar mencapai 33.522 orang, diantaranya 6.222 adalah jamaah haji laut. Pendaftaran ditutup akhir Juli nanti. Kepada Pers di Bina Graha, Mukti Ali menjelaskan bahwa jumlah jamaah haji dari Indonesia tidak dibatasi, sebab fasilitas yang tersedia di Saudi Arabia termasuk tempat penginapan dan sebagainya ini telah mencukupi. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, mulai tahun ini tahun ini para calon harus memeriksakan kesehatannya terlebih dahulu sebelum dinyatakan lulus dan menyetorkan ONH nya. Ongkos haji pada tahun ini Rp.795.000 dan uang bekal kembali sebesar Rp.17.500 dan dana-dana untuk keperluan disana.⁶⁰

⁵⁹ Koran kompas, *Jumlah Jemaah Haji Mendatang tergantung Fasilitas Yang Ada* , Senin, 10 Maret 1975, hlm 1

⁶⁰ Koran kompas, *33.522 Calon Jemaah Haji Tercatat Sampai Akhir Pekan Lalu* , Selasa, 24 Juni 1975, hlm 2

C. **Kebijakan Abdul Mukti Ali tentang Kerukunan Umat beragama**

Abdul Mukti Ali seorang pemikir yang sangat intensif, latar pemikirannya telah berakar dari sejak ia masih kecil. Tradisi keilmuan agamanya sangat kental ditambah dengan pengalamannya, wawasannya, serta pemikiran modernnya yang kaya. Ia banyak terlibat dalam berbagai organisasi kemasyarakatan salah satunya di tahun 1958 ketika ia pernah mengikuti Kogres Sejarah Agama di IX di Tokyo, tahun 1970 mengikuti dialog antar agama di Beirut dengan judul kongres Dialogue between Men of Living Faith, dan juga pernah berpartisipasi dalam konperensi World Conference On Religion and Peace yang diadakan di Kyoto, dengan tema (agama dan perdamaian).

Latar belakang pendidikan Abdul Mukti Ali tidak diragukan lagi berasal dari kaum santri. Jika mengulik kembali latar belakang pendidikannya yang ia mulai dari sekolah milik Pemerintah Hindia Belanda, yakni HIS (Hollandsch Inlandsche School) kemudian melanjutkannya ke Pesantren Termas dimana telah memberinya pemahaman yang mendalam tentang agama (Islam) dan mengubahnyamenjadi santri yang berpikiran terbuka, sampai ketika ia melanjutkan studi Perbandingan Agama dalam program MA di Institut studi Islam, Universitas McGill dan pertemuannya dengan Professor Smith yang iaakui telah mengubah sudut pandannya.⁶¹

⁶¹ Basuki, *Pemikiran Keagamaan A. Mukti Ali*, hlm 20.

Sebagai seorang pemikir sekaligus tokoh politik, Abdul Mukti Ali kerap kali melakukan debat keilmuan di dalam menyampaikan ide dan pemikirannya. Ia di anggap sebagai seorang pembaharu agama, terlebih khusus Islam. Ia banyak menulis dan mengutip beberapa tokoh pembaharuan Islam seperti Muhammad Iqbal, Muhammad Abduh, Ahmad Dahkhan, dan beberapa tokoh pembaharu lainnya. Mukti Ali memiliki keinginan untuk membangun kerukunan dalam beragama di Indonesia melalui pendekatan holistik. Untuk mewujudkan dibutuhkan pemahaman yang kompleks, dalam memperhatikan hubungan antara budaya dan ajaran Islam.⁶²

Menurut Mukti Ali pemahaman agama atau metodologi sangat penting, hal ini karena bagi aktivitas hidup manusia, metode memiliki arti yang sangat penting. Menurutnya lahirnya berbagai disiplin ilmu adalah perubahan metodologi yang fundamental. Sains, masyarakat, bahkan dunia akan berubah, apabila masalah objek berubah, maka diperlukan metodologi yang tepat dalam memahami agama sebagai penekan perubahan kearah yang tidak diinginkan. Ketika menjabat sebagai Menteri agama, Abdul Mukti Ali mendapati banyak fenomena-fenomena sosial. Salah satunya, yakni masalah kerukunan hidup umat beragama. Sebenarnya di zaman kepemimpinan K. H. M. Ahmad Dachlan fenomena ini mulai di rintis dengan cara diskusi bersama para tokoh-tokoh agama,

⁶² *Ibid.*, hlm 23

namun masih belum ada titik temu.⁶³ Sebenarnya di zaman kepemimpinan K. H. M. Ahmad Dachlan fenomena ini mulai di rintis dengan cara diskusi bersama para tokoh-tokoh agama, namun masih belum ada titik temu. Maka dari itu dalam menciptakan kerukunan umat beragama Mukti Ali berkeinginan melanjutkan upaya tersebut melalui pendekatan dan metodologi yang di milikinya, seperti melalui Ilmu perbandingan agama, Toleransi, serta metodologi dalam memahami ajaran Islam. Semua itu adalah jalan yang di tunjukkan oleh Abdul Mukti Ali dalam menciptakan kerukunan hidup beragama.⁶⁴

Dalam perkembangan sejarah pemikiran khususnya di Indonesia, Mukti Ali berhasil mengangkat tema tentang hubungan antaragama, ia juga berhasil memperbaharui model dan metode pengajaran studi agama yang ada di Indonesia yang dipelajarih di IAIN seluruh Indonesia. Berkat itu Mukti Ali di nobatkan sebagai bapak “Perbandingan Agama di Indonesia”. Mukti Ali dikenal sangat kritis mengenai metodenya sendiri dalam ilmu perbandingan agama ia mempebaharui metode studi antaragama yang ada di IAIN. Merujuk pada perkembangan sejarah akademik di Indonesia, Perbandingan Agama di kategorikan ke dalam Ilmu Agama yang

⁶³ Djam’annuri, et al., *70 Tahun H. A. Mukti Ali: Agama dan Masyarakat*, hlm 35.

⁶⁴ Rambe, “*Pemikiran A. Mukti Ali dan Kontribusinya Terhadap Kerukunan Antar Umat Beragama*”, hlm 101.

kemudian dibagi menjadi tiga bagian: Sejarah Agama, Perbandingan Agama, dan Filsafat Agama.⁶⁵

Agama, adalah objek kajian dalam studi ini dimana membahas tentang sejarah, perkembangan, kepercayaan dan lainnya dari berbagai agama yang ada dengan metode yang bersifat ilmiah atau yang Mukti Ali sebut *Scientific-cum-doktrinire*. Pendekatan ini bukan orisinal dari pemikirannya sendiri melainkan hasil dari pemahamannya terhadap pemikiran Joachim Wach kemudian mensintesiskannya dengan pemikiran Professor Smith. Menurutnya, pendekatan ilmiah dan doktrine harus digunakan, agar memperoleh hasil yang lengkap serta objektif. Selama ini metode ilmiah kerap digunakan para pemikir, termasuk para oreantalis. Akibatnya pemahaman mereka mengenai agama terutama Islam mengalami kecacatan. Munculnya pernyataan-pernyataan islam yang ketinggalan jaman dan tidak sesuai dengan pembangunan di karenakanpara ahli agama, dalam memahami agama hanya terbiasa menggunakan pendekatan doktrin.⁶⁶

Abdul Mukti Ali ketika memperkenalkan dan mengajarkan studi Perbandingan Agama di Indonesia mempunyai tujuan yakni menumbuhkan toleransi dalam beragama. Menurutnya pengetahuan tentang agama lain yang berbeda, sikap terbuka dan toleransi terhadap perbedaan agama akan

⁶⁵ Arifinsyah, *Ilmu Perbandingan Agama: Dari Regulasi ke Toleransi* (Medan: Perdana Publishing, 2018), hlm 33

⁶⁶ *Ibid.*, hlm 35

meningkat. Dalam perkembangannya, Perbandingan Agama telah diakui sebagai cabang ilmu pengetahuan yang dalam Bahasa Arab nya dikenal sebagai ilmu Muqaranatul Adyan sebagaimana judul buku Ahmad Syalaby yaitu Muqaranah al-adyan, yaitu ilmu yang fokusnya mempelajari nilai-nilai yang terkandung dalam suatu agama kemudian membandingkannya dengan agama lainnya.

Abdul Mukti Ali mendefinisi mengenai Ilmu Perbandingan Agama, menurutnya Ilmu Perbandingan agama adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berusaha menyelidiki serta memahami aspek atau sikap keagamaan dari suatu kepercayaan (agama), dalam hubungannya dengan agama-agama lain meliputi persamaan dan perbedaannya. “Ilmu Perbandingan Agama merupakan ungkapan pendek yang tepat digunakan untuk menilai kajian terhadap aama-agama tanpa terikat dengan satu sejarah agama”. Studi banding agama, atau yang disingkat agama komparatif sebenarnya ungkapan yang digunakan untuk menunjukkan studi agama para sarjana tidak membatasi perhatiannya pada satu kasus sejarah saja. Bisa di katakan bahwa setiap siswa agama harus peduli dengan perbandingan agama hanya karena pertimbangan data yang merekapahami. Selian itu, setiap pandangan umum atau teori agama harus mengambil dan memperhitungkan persamaan dan ketidaksamaan antara agama tertentu, karena bergantung pada studi perbandingan.

Abdul Mukti Ali memberikan dua tingkatan di dalam memahami agama lain. Pertama, tingkatan parsial yaitu memahami agama sebagaimana yang dilakukan oleh orang pada umumnya. Kedua, tingkatan integral dalam memahami agama ada hal-hal tertentu yang harus dipenuhiantaranya seperti memiliki Intelektual, Feeling atau kondisi emosional yang memadai, memiliki tujuan yang konstruktif, dan terakhir memiliki pengalaman di bidangnya. Melalui Ilmu Perbandingan Agama, memahami agama secara kontekstual dalam mengatasi masalah-masalah kehidupan umat beragama yang kompleks, itulah yang ingin di sampaikan oleh Mukti Ali. Lebih lanjut lagi, ia berupaya mewujudkan keharmonisan antara umat beragama, ia menginginkan agar melalui agama manusia dapat hidup secara damai penduli akan toleransi terhadap sesama. Jika hal demikian dapat diterima dan diaplikasikan, maka bisa saja kerukunan antarumat beragama yang sangat ingin diwujudkan oleh Mukti Ali akan tercipta.⁶⁷

D. RUU Perkawinan

Terakhir ketika Abdul Mukti Ali menjabat sebagai menteri agama. Terdapat satu kebijakan yang menyedot partisipasi atau concern Islam secara luas, yakni ketika Undang - Undang no. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Proses pengajuan RUU ini membawa pemerintah orde baru, khususnya departemen agama ke dalam situasi politik dan psikologis yang mencekam. Sehingga Abdul Mukti Ali mendapat penolakan keras terhadap

⁶⁷ Ibid 37

RUU tersebut.⁶⁸ Beberapa poin yang menimbulkan masalah dalam RUU ini terletak pada pasal 2 ayat 1 yang berbunyi; “Perkawinan adalah sah bila dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Perkawinan, dicatat dalam daftar pencatat perkawinan oleh pegawai tersebut, dan dilangsungkan menurut Undang-Undang ini dan atau ketentuan hukum perkawinan pihak - pihak yang melakukan perkawinan sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang”.⁶⁹ Pasal ini ditolak umat Islam Karena keabsahan perkawinan bukan tergantung kepada pegawai pemerintah. Pasal lain yang mengundang penolakan adalah Pasal 11 ayat 2, yang berbunyi: “ Perbedaan karena kebangsaan, suku bangsa, Negara asal, tempat asal, agama / kepercayaan dan keturunan tidak merupakan penghalang perkawinan”. Pasal ini dipandang sebagai upaya untuk melegalkan pernikahan beda agama dan upaya pemurtadan umat Islam. Beragam upaya dilakukan umat Islam untuk menyampaikan protes mereka, mulai dari menyurati pemerintah hingga aksi demonstrasi yang merebak hingga ke daerah. Protes mencapai puncaknya pada 27 September 1973, ketika Menteri Agama, Abdul Mukti Ali memberikan jawaban atas pandangan umum fraksi - fraksi di DPR atas RUU tersebut. Ketika ia hampir selesai berpidato, Sekumpulan mahasiswa Muslim berteriak dan memegang spanduk-spanduk protes bertuliskan RUU Perkawinan adalah konsep kafir” serta RUU Perkawinan

⁶⁸ Munhanif. Ali, Prof. Dr. A. Mukti Ali; Modernisasi Politik Keagamaan Orde Baru, Portal Kementerian Agama, 1997 ,hlm 306

⁶⁹ Koran Abadi, *Teruskan Lobbying R.U.U Perkawinan*, 11 September 1973

adalah tidak bermoral⁷⁰. Ada pula terdengar tangisan sambil berkata Allahu Akbar. Menyadari situasi tak kondusif, Menteri Agama dan banyak anggota parlemen meninggalkan ruangan. Tak lama, sekitar 500 mahasiswa menduduki ruangan tersebut. Kegaduhan politik yang diakibatkan oleh RUU perkawinan mulai mereda setelah diadakan pendekatan dengan Presiden Soeharto. Intinya, pendekatan itu dimaksudkan untuk memberikan pengertian kepada presiden bahwa muatan RUU tersebut benar – benar mengganggu akidah umat Islam. Dari situ Abdul Mukti Ali memprakarsai untuk berdialog dan lobi informal dengan pemuka-pemuka Islam dan non Islam untuk mencari penyelesaian di luar sidang DPR. Melalui perdebatan yang panjang akhirnya pada tanggal 2 Januari 1974 disahkan menjadi UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Namun, undang-undang ini mulai berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975, alasan yang diberikan seperti tertulis dalam penjelasan umum Peraturan Pelaksanaannya (PP No. 9 Tahun 1975).

⁷⁰ Khairuddin Nasution, Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan perbandingann hukum perkawinan di dunia Muslim, 2009), hlm 41 - 42

BAB V

KESIMPULAN

Prof. Dr. KH. Abdul Mukti merupakan Menteri Agama di tahun 1971 – 1978. Abdul Mukti Ali menjabat sebagai Menteri Agama menggantikan K.H. Muhammad Dachlan Kabinet Pembangunan I. Ketika Mukti Ali memimpin Departemen Agama, posisi jabatan pemerintahan ini sudah begitu mantab didalam struktur pemerintahan Republik Indonesia. Bisa dikatakan, hampir tidak ada lagi kalangan masyarakat yang mempertanyakan, apalagi meragukan kehadiran dan fungsi Departemen Agama.

Sejak menjabat sebagai Menteri Agama, A.Mukti Ali memiliki beberapa pemikiran yang tertulis di beberapa media massa, diantaranya dalam surat kabar harian Kompas yang membahas tentang;

Pertama, pemikiran A.Mukti Ali tentang Pendidikan yaitu memberikan pembaharuan pengajaran pada pondok-pondok pesantren, Gagasan pembaharuann di IAIN Salatiga, Menambahkan Pendidikan islam, Peningkatan mutu di beberapa sekolah yang berbasis islam.

Kedua, pemikiran A.Mukti Ali tentang Haji yaitu melonjaknya jamaah haji di Indonesia karena pada saat ia menjabat sebagai Menteri Agama jumlah kuota haji ditambah dan ditambahnya armada penerbangan, jalur darat dan jalur laut.

Ketiga, dialog antar umat beragama. Menurutnya musyawarah antar agama hendaknya dimulai dari lingkungan kampus, sebab didalam penyebaran ide

dan pembaharuan diperlukan suatu kelompok kecil, minoritas kreatif yang hanya dapat diproduksi di perguruan tinggi.

Keempat, pemikirannya tentang RUU Perkawinan, menurutnya perkawinan adalah sah bila dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Perkawinan, dicatat dalam daftar pencatat perkawinan oleh pegawai tersebut, dan dilangsungkan menurut Undang-Undang dan ketentuan hukum perkawinan pihak-pihak yang melakukan perkawinan sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang. Namun ditolak oleh umat Islam karena keabsahan perkawinan bukan tergantung kepada pegawai pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip

Cuplikan Dari Pidato Pejabat Presiden Jendral Soeharto Kepada Sidang Kabinet
AMPERA tanggal 19 April 1967.

Koran Abadi

“*Presiden Menjetudjui Konsep-Konsep Pembaruan Pengadjaran Pondok-Pondok
Pesantren*”, Selasa 5 Oktober 1971

“*Teruskan Lobbying R.U.U Perkawinan*”, Selasa 11 September 1973

Koran Kompas

“Jumlah Jemaah Haji Mendatang tergantung Fasilitas Yang Ada”, Senin 10 Maret
1975

“Ongkos haji laut Rp.424.000, udara Rp.446.000”, Selasa 22 Mei 1973

“Sebab-sebab Meningkatnya Jumlah Jemaah Haji”, Selasa, 22 Mei 1973

“Dioalog Antar Agama Hendaknja Dimulai Dari Kampus” 1971.

Buku

Musyrifah Sunanto. 2012. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: Raja Grafindo
Persada.

Abdul Mukti Ali. 1972. *Agama dan Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: Biro
Humas Depag RI, Bagian 1 s/d 9.

Abdurrahman, Burhanuddin Daya, Djam’annuri (ed). 1930. *Agama dan
Masyarakat; 70 Tahun H.A. Mukti Ali*. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga
Prees.

- Akhmad Taufik. 2005. *Sejarah Pemikiran dan Tokoh Modernisme Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ali Munhanif. 1997. *Prof. Dr. A. Mukti Ali; Modernisasi Politik Keagamaan Orde Baru*. Portal Kementerian Agama.
- Arifinsyah. 2018. *Ilmu Perbandingan Agama: Dari Regulasi ke Toleransi*. Medan: Perdana Publishing.
- Azra Azyumardi, Saiful Umam. 1998. *Menteri-Menteri Agama RI Biografi Sosial-Politik*. Jakarta : PPIM.
- Basuki, Singgih. 2013. *Pemikiran Keagamaan Mukti Ali*, Yogyakarta. Suka Press.
- Djam'annuri. et al., *70 Tahun H. A. Mukti Ali: Agama dan Masyarakat*
- Djiwandono, J Soedjati dan T.A Legowo. 1996. *Revitalisasi Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: CSIS.
- Dudung Abdurahman. 1999. *Metode Penelitian Sejarah*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Fananie, Zainuddin. 1999. *Perlawanan Rakyat Terhadap Hegemoni Kekuasaan*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Kuntowijoyo. 1995. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Benteng Pustaka.
- Kuntowijoyo. 2008. *Penjelasan Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Leo Agung. 2013. *Sejarah Intelektual*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Liddle, R. William. 1992. *Pemilu-Pemilu Orde Baru: Pasang Surut Kekuatan Politik*. Jakarta: LP3ES.
- Maf'ul, Arsyad. 2012. *Partai Politik Pada Masa Orde Baru dan Orde Lama*. Makassar: Universitas Negeri Makassar.

Mohammad Damami. 2002. *dalam Limah Tokoh IAIN Sunan Kalijaga*
Yogyakarta

Mukti Ali. 2002. ” *Ilmu Perbandingan Agama di Indonesia*”. Yogyakarta;
Yayasan Nida.

Rambe, “*Pemikiran A. Mukti Ali dan Kontribusinya Terhadap Kerukunan Antar*
Umat Beragama”

Sartono Kartodirdjo. 1982. *Pemikiran Dan Perkembangan Historiografi*
Indonesia: Suatu Alternatif Sartono Kartodirdjo. Jakarta: Gramedia.

Skripsi

Kannah Siti. 2003 .”*Studi Agama Dalam Perspektif H.A Mukti Ali*” Skripsi dari
fakultas Ushulludin : Institus Agama Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Fandi Ahmad Saiful Hadii. 2016. ”*Studi Hermeneutika Al-Qur’an A. Mukti*
Ali”Skripsi dari Ushuludin dan Pemikiran Islam : Universitas Agama
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Zahroni Ahmad. 2016 .”*Konsep Pendidikan Islam Menurut H.A Mukti Ali*” Skripsi
dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan: Universitas Agama Islam
Negeri Salatiga.

Jurnal

Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD
Kota Tomohon. Jurnal administrasi publik, Vol 04 No. 048.

Jurnal Pemikiran Mukti Ali oleh Elihami. 2018. STKIP Muhammadiyah Enerkang.

LAMPIRAN

A. Koran Kompas

Koran Kompas 1

10 Maret 1973

Sebab-sebab Meningkatnya Jumlah Jemaah Haji

Jakarta, Kompas.

Menteri Agama Prof. H.A. Mukti Ali menyebutkan tiga hal sehubungan dengan meningkatnya jumlah jemaah Haji Indonesia tahun ini.

Menjawab pertanyaan pers selesai menemui Presiden Soeharto di Cendana Senin siang kemarin, Menteri mengatakan, bahwa hal itu disebabkan prosedur yang mudah dan ke-laliman yang makin kuat. Peningkatan itu juga merupakan indikator, bahwa pembangunan di Indonesia sudah cukup berhasil.

Tentang yang terakhir ini Mukti Ali menyebutkan "peternak lembu" dan "petani cengkeh" sebagai misal.

"Peternak lembu sekarang cukup menjual lima atau enam lembunya untuk ongkos naik Haji. Tapi dulu, mereka harus menjual sekandang. Petani cengkeh, cukup menjual 15 sampai 20 batang saja", ujarnya.

Jumlah jemaah Haji Indonesia belakangan ini memang meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 1971/1972 masih sekitar 12.000 orang; menjadi 22.000 orang pada 1972/1973 dan meningkat lagi menjadi sekitar 42.000 orang pada 1973/1974 yang lalu. Tahun 1974/1975 ini (1394 H/riyah) jemaah Haji tercatat 62.704 orang, belum termasuk 77 petugas MPH (Majelis Pimpinan

Haji), 135 RKHI (Rombongan Kesehatan Haji Indonesia) dan 4 orang team survey.

Lapor Presiden.

Menteri Mukti Ali mengatakan, kedatangannya ke Cendana adalah untuk melaporkan beberapa hal kepada Presiden Soeharto. Antara lain tentang pemberangkatan jemaah Haji, yang menurut Mukti Ali "berjalan seperti biasa dan tidak ada kesulitan".

Ia juga melaporkan hasil-hasil seminar tentang "Peranan Pimpinan Agama dalam Pembangunan Indonesia". Seminar itu berlangsung di Aceh dan menghasilkan beberapa rekomendasi. Antara lain agar nilai-nilai agama yang mendorong pembangunan lebih digali lagi. Mereka juga merekomendasikan masalah-masalah pendidikan yang perlu digarap sebaik-baiknya di seluruh Indonesia.

Peresmian Pesantren Pancasila di Bengkulu tanggal 18 Nopember dan Lokakarya Mualligh se-Indonesia mulai 26 hingga 29 Nopember di Jakarta, juga dilaporkannya kepada Presiden. Menurut Menteri, para peserta lokakarya ini akan diterima Presiden di Istana pada tanggal 30 Nopember. (azka)

Koran Kompas 3

26 Januari 1973



Koran Kompas 2

23 Agustus 1974



KOMPAS - SENIN, 10 MARET 1975 HALAMAN 1

Jumlah Jemaah Haji Mendatang Tergantung Fasilitas yang Ada

• Penerbangan Nasional diluar Garuda Disertakan Angkut Calon Haji

Jakarta, Kompas. Presiden Soeharto pada prinsipnya bersedia tidak membatasi jumlah calon jemaah haji. Namun sedikit atau banyaknya jemaah muslim haji mendatang bergantung kepada kemungkinan fasilitas yang tersedia di Saudi Arabia.

Demikian Menteri Agama Prof. HA Muhi Ali hari Sabtu, setelah melaporkan masalah haji kepada Presiden di Istana Merdeka. Dalam perjumpaan itu, Menteri Agama didampingi oleh Dirjen Urusan Haji Kol. H. Burhani Tjokrohandoko.

Menurut Prof. Muhi Ali, Pemerintah Indonesia bulan Maret ini akan mengirim team ke Saudi Arabia untuk mempelajari berbagai fasilitas yang diperlukan calon jemaah haji musim mendatang. Team akan menyelidiki jumlah tempat pemondokan yang dapat disediakan oleh para syekh setempat, bentuk air minum, kendaraan, perlengkapan dan sebagainya. Ini semua guna meningkatkan pelayanan terhadap para jemaah haji Indonesia.

Tentang besarnya QNH (Ongkos Haji Haji) untuk musim haji 1975-76 mendatang baru akan ditentukan setelah team tersebut kembali. Jawa, Madura dan Sumatera.

Menteri Agama mengungkapkan pula, perjalanan ke Tanah Suci untuk para jemaah haji dari Jawa, Madura dan Sumatera, untuk musim haji mendatang diatur dengan menggunakan pesawat udara. Sedangkan jemaah dari daerah-daerah lain dituntut akan menggunakan kapal laut.

Peleaksanaannya nanti akan diatur lebih lanjut bersama Departemen Perhubungan, demikian Menteri Muhi Ali.

Ditentukan juga, penerbangan-penerbangan nasional lainnya akan disertakan pula untuk menangkut jemaah mulai tahun 1975. Tapi koordinasi tetap dipegang oleh Garuda, hingga semuanya ber-

(Berlanjut kehal. XII hal 9)

Jumlah — (Sambungan dari halaman 9)
(Sambungan dari halaman 9)
(Sambungan dari halaman 9)
"dibawah bendera Garuda"

Untuk tidak mengganggu kelalutan penerbangan umum, pemerintah merencanakan untuk membangun terminal khusus untuk haji, di lapangan terbang Halim Perdanakusuma.

Ditambahkan, dalam usaha meningkatkan pelayanan terhadap jemaah haji Indonesia, baru-baru ini Dirjen Urusan Haji telah mengadakan lokakarya di Jakarta. Kemudian pada 17-18 Maret mendatang akan diadakan pula Musyawarah Alim Ulama untuk membahasakan segala sesuatu tentang ibadah haji yang menyangkut "murni agama".

Remeniera itu Dirjen Urusan Haji Burhani Tjokrohandoko menjelaskan, tidak ada jemaah Haji Indonesia yang "hilang". Mereka itu sebenarnya telah menikmati kuliah dan sebagian lagi bekerja di sana sebagai buruh murah. (Pw)

Jangkauan Media Massa

MENTERI AGAMA Prof. Dr. Makti Ali membuka pematangan wartawan dalam bidang agama di Pesantren Darussalam Gontor, Ponorogo, Peris diutamakan sebagai suatu usaha yang baik, bahwa pematangan itu diselenggarakan di suatu pesantren.

Dalam upacara pembukaan, Menteri menunjukkan jumlah penduduk Indonesia yang bisa dijangkau oleh media massa, surat kabar, majalah, radio, televisi, dengan ini sekitar 80 juta. Padahal penduduk Indonesia 120 juta, jadi 70 juta memperoleh informasi dengan cara lain, yaitu lewat komunikasi antar pribadi, komunikasi wawancuku.

Dalam komunikasi antar pribadi itu, pemimpin informal seperti ulama, pendeta, guru dan pemimpin adat memegang peranan penting. Maka disarankan oleh Menteri, agar wartawan bergaul dengan para pemimpin informal itu. Baik untuk memperoleh informasi dari masyarakat maupun untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat.

KETELETIAN jumlah angka 80 juta, masih bisa diperdebatkan. Mungkin lebih kurang dari jumlah itu. Yang sudah pasti, komunikasi wawancuku, komunikasi antar pribadi, memegang peranan penting.

DI AN pernah diadakan beberapa kali penelitian. Salah satu kesimpulannya dipakai data untuk menumbuhkan suatu teori yang disebut "komunikasi dua tingkat", two steps communication.

Dari penyelidikan itu diketahui, juga dalam masyarakat yang membaca koran, peranan pemimpin masyarakat tetap penting dalam proses pengambilan keputusan oleh warga masyarakat. Misalnya dalam pemilihan umum.

Media massa mempunyai pengaruh. Tetapi pengaruhnya itu ditentukan secara substansial oleh lembaga sosial lain dalam masyarakat, termasuk pemimpin, pemuka atau orang terpuja dalam lingkungan masyarakat.

SERUHANENYA menurut laporan Anisya, Menteri Agama tidak menyebutkan film dalam pidatonya. Film cerita yang temanya diarahkan, rasanya akan berperan besar dalam memberikan informasi dimasyarakat, terutama jika dimasyarakat pedesaan.

Masyarakat pedesaan sudah biasa menonton wayang. Saluran informasi dan komunikasi yang turun temurun, bukanlah membaca, tetapi menonton dan mendengarkan. Televisi memenuhi persyaratan itu. Film bisa lebih efektif, karena akan membentuk suatu penonton yang sekaligus besar jumlahnya. Daya ekspresinya juga lebih kuat karena gambarnya lebih besar.

Sebagai saluran informasi dan komunikasi pembangunan masyarakat, petanai film cerita disamping film dokumentasi yang baik, belum kita manfaatkan. Barangkali terbentur biaya. Tetapi jika dilihat besar manfaatnya, mestinya biaya bisa disediakan.

KINI sedang ditombangkan gagasan koran masuk desa. Ada dua pengertian disini. Koran secara massal dicarubasa ke desa. Dan koran dibaca oleh para pemimpin formal dan informal di desa dan lewat mereka itu diteruskan sebagai bahan komunikasi kepada masyarakat desa.

Koran itu gejala kota. Sekurangnya begitulah pertumbuhannya selama ini di negara lain maupun di negeri kita. Memang terjadi pengaruh timbal balik, namun secara historis ditunjukkan, diperlukan suatu lingkungan sosial dan perkembangan tertentu, sebelum masyarakat mau membaca koran.

Bisa terjadi penyimpangan dari pola itu. Taktik terutup kemungkinan koran secara massal sudah bisa masuk desa sekarang juga. Kita hanya ingin menyarankan, agar disediakan dulu segala sesuatunya.

Ada kemungkinan lain, bukan koran yang akan lebih efektif, jika masuk desa kini, tetapi radio atau televisi atau film. Andai kata benar, tiga media massa terakhir itu akan lebih efektif, tentu ketiga itu yang pertamanya harus ditangani.

Jika koran juga yang hendak dimasukkan ke desa, masyarakat pers tentu akan lebih gembira, jika koran didasarkan itu dimanfaatkan sebagai basis perkembangan. Sekaligus mendorong perkembangan pers di daerah.

MENTERI AGAMA — PROF. DR. MUKTI ALI :

Dialog Antar Agama Hendaknya Dimulai Dari Kampus

Djakarta, 20 Des. (Kompas). Menteri Agama Prof. Dr. Mukti Ali menyatakan dalam Uraannya di Universitas Katolik Parahyangan Sabtu 19, bahwa hendaknya dialog antar agama dimulai dari lingkungan kampus universitas atau perguruan tinggi. Sebab didalam penjabaran ide dan pembaruan diperlukan suatu kelompok keji, misertar kreatif yang bisa dapat di-produksi di Perguruan Tinggi. Pionernya dialog supaya ten tang masalah2 pembangunan.

Menteri Agama Prof Dr Mukti Ali datang ke Bandung se lain untuk memberikan ijeramah di Universitas Padjadjaran untuk mengemukakan pendapatnya ke IAIN Sunan Gunung Djati serta bangunan dan gambarnya bangunan yang akan dibelikan ditepi kota.

Menteri menjelaskan, bahwa Musyawarah Antar Agama yang dilakukan pada tahun 1968 di Djakarta gagal, karena diorganisir oleh pemerintah dan wakil2 partai politik yang diundang. Sebab itulah baru dilakukan dialog dijumlah dilakukan oleh pemerintah. Dan jaman pada dilaksanakan oleh partai politik.

Konkili akan II

Adalah menurut sekretaris, bahwa Prof Dr Mukti Ali dalam "konkili ke II" pada 20 Desember 1971 di Bandung yang akan diadakan pada 20 Desember 1971 nanti. Akan diadakan pertemuan antar agama di Bandung yang akan diadakan.

Menteri menegaskan, di dalam Konferensi Ke II di Bandung Gereja Katolik terhadap umat Islam. Terhadap umat Islam, Gereja Katolik memandang dengan penghargaan. Umat Islam memanggulkan Tuhan Yang Maha Esa, yang hidup dan Kewalid di Maha Penguasa dan Maha Kuasa. Penjelita Lahir dan Bani dan Maha Bicara kepada manusia. Umat Islam berusa ha untuk meniadakan diri dengan se-kehidupan manusia Tuhan, seperti apa yang di-terbawakan oleh Abraham, Akiba, dan Yesus. Islam mem-berikan kehidupan yang ber-keadilan, adil dan menentu pada manusia, terutama dengan dialog antar agama, meniadakan se-kehidupan manusia.

Konkili ke II akan diadakan di Bandung pada 20 Desember 1971.

„Sehalpundalam abad2 yang lalu banyak pertentangan dan permusuhan terjadi an bers umat Kristen dan Islam keadaan sekarang mendesak kita semua supaya melupa-kan masa yang lalu dan ber usaha dengan se-kehidupan untuk terciptanya saling pe-ngertian dan kerjasama un tuk memelihara dan mengo-bahkan keadaan sosial, nilai2 moral, perdamaian dan ke-keadilan.“



KOMPAS - SELASA, 24 JUNI 1975 HALAMAN 2

33.522 Calon Jemaah Haji Tercatat Sampai Akhir Pekan Lalu

Jakarta, Kompas

Sampai Sabtu lalu, calon jemaah haji Indonesia yang terdaftar mencapai 33.522 orang, diantaranya 6.222 adalah jemaah haji laut. Pendaftaran ditutup akhir Juli nanti. Kepada pers di Bina Graha, Menteri Agama Prof. Mukti Ali Senin kemarin menjelaskan bahwa jumlah jemaah haji dari Indonesia tidak dibatasi, sebab fasilitas yang tersedia di Saudi Arabia, termasuk tempat penginapan dan sebagainya kini telah mencukupi. Tapi berbeda dengan waktu-waktu lampau, mulai tahun ini para calon harus memeriksakan ke sehatannya terlebih dahulu sebelum dinyatakan "lulus" dan menyeterikan ONH-nya. Tahun lalu, jumlah jemaah haji Indonesia tercatat mencapai hampir 70.000 orang.

Menteri Mukti Ali baru saja melaporkan kepada Presiden Soeharto rencana Musyawarah Nasional untuk pembentukan Majelis Ulama (Islam) Pusat, yang akan berangsur di Jakarta tanggal 21-27 Juli nanti. Presiden Soeharto sendiri yang akan membuka Munas tersebut. Musyawarah ini akan diikuti ketua dan wakil ketua Majelis Ulama tingkat Propinsi, wakil kantor wilayah Departemen Agama di propinsi serta wakil-wakil Departemen Dalam Kesejahteraan Rakyat di propinsi-propinsi.

Diharapkan setelah Majelis di Pusat terbentuk, akan disusul dengan pembentukan semacam "badan konsultasi" yang akan menampung kerjasama dan dialog dengan badan-badan pimpinan agama lain seperti MAWI dan DGI,

guna mencapai kerukunan dan kerjasama lebih erat antar umat beragama.

Koperasi Pondok Pesantren Koperasi yang baru saja membuka musyawarah dan penataran koperasi pondok pesantren di Sumatra di Padang tanggal 18 Juni lalu mengemukakan, penataran serupa akan diadakan pula di Sulawesi akhir tahun nanti. Penataran di Sumatra diikuti 41 pondok pesantren.

Kini terdapat 120 pondok pesantren yang punya koperasi, diantaranya 19 di Jawa. Koperasi itu semuanya berjalan baik. Menurut Mukti Ali, pusat-pusat latihan ke-trampilan bagi pondok pesantren kini terdapat di Narmada (NTB), Madiun (Jatim), Pabelan (Jateng) dan Ciamis (Jabar). Dan tahun ini, 41 pondok pesantren akan memperoleh biaya Rp 120 juta untuk biaya latihan serta perlengkapan alat-alat ke-trampilan lainnya. (rb)

B. Koran Abadi

Koran Abadi 2
11 Januari 1973

Mukti Ali : Occidentalisme Mulai Tumbuh Di Indonesia

Jakarta, 11 Januari (Abadi) — Sekelompok orang di Indonesia ke- lah ada kaligrafi dari selo- hampok yang sudah mendua- mi dari masyarakat agama dan kebudayaan yang tumbuh di- garis Barat atau apa yang dia- rui dengan "occidentalisme".

Dipertika diorganisir oleh Menteri Agama Mukti Ali di- hadapan peserta Penalaran Pe- nataran Para di Bidang Ke- tuwaan yang diselenggarakan di gedung PWI Jaya kemarin malam. Semuanya dilakukan oleh Menteri bahwa orang- orang telah berhadiah mempelajari masalah keagamaan dari ke- warisan yang tumbuh di Na- garah Timur dari mereka. Di- samping sebagai Orientalis, Me- nteri Mukti Ali Occidentalisme ini baru tumbuh sejak tahun 1960 dan IAIN bermarkas- lah atau lembaga yang terma- kanya. Istilah mulai mulai populer yang disebut bukan dengan Agama. Dan kini telah ada orang-nya yang mempu- nyai keahlian dalam masalah ke- tuwaan.

Menteri Mukti Ali Occiden- talisme itu akan sangat besar pengaruhnya dalam pertumbuhan bangsa Indonesia dikemari- an baru. Karena dengan peng- tahuan itu orang dapat meng- peroleh kehidupan agama yang lebih sesuai. Islam dan lain- lain dapat membawa masyarakat ber- alang lapangan studi.

Mendukung Agrega- si ini

Mengingat latar belakang pertumbuhan Occidentalisme itu sendiri oleh Mukti Ali di- kaitkan berdasarkan keperba- han yang tumbuh sangat lama me- ngikuti usaha pemeluk agama ada dengan lain yang tumbuh di Indonesia. Lebih dari itu — katanya — karena adanya oc- cidentalisme mulai sebagai Dep. Agama secara menyeluruh mereka anggap dalam ber- tuk budaya antar umat berag- am di Indonesia. Salah satu Menteri Mukti Ali menyatakan: "Lain lain yang meredakan dan menyebarkan masalah yang ber- hubung dengan occidentalisme itu." (D-48)



Jakarta, 11 Jan. (Abadi).
ILAWAN CHANDRA alias Chai Peng Lock (21 tahun) dari Tegal, kemarin telah dibuang ke luar negaranya oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara korupsi. Ia dijatuhi hukuman penjara 200 hari dan denda Rp 200.000. Ia ditangkap sekitar bulan April 1972 sampai Oktober 1972 di Januari.

Peraturan menyatakan ter- hadap Irawan Chandra pemerhati- an rumah orang tua Pungwa- ri di Scrubora, Tegal. Dia di- khamir di salah tempat lain.

Menteri Sosial Mustardis ini atas nama Presiden R.I. Soeharto (1. Januari 1973) berhadiah di Gedung Nasional ke- dua. Menteri K. H. Zaenal Mustadik seorang dari Kabupaten Tasikmalaya yang diterima oleh Menteri- nya. Menteri Sosial Mustardis ini ketika menjabat- nya di Gedung Nasional dari Presiden R.I. ke- dua oleh Umarohun. (Tribun)

Koran Abadi 1
24 Januari 1973

PENATARAN "PERS - AGAMA" DITUTUP :

MUKTI ALI : KRITIKLAH KAMI

SEMAKIN BANYAK KRITIK SEMAKIN BAIK

Jakarta, 24 Jan. (Abadi).
 Menteri Agama H.A. Mukti Ali kemarin menyatakan selo- ngal sangat penting kritik yang diberikan oleh para di- namia keagamaan dan kebudayaan se- kitar ini. Sebab, kritik itu akan dapat membantu perbah- asan dan perbaikan. Hal ini sangat penting untuk bangsa.

Hal itu dikemukakan oleh Menteri Mukti Ali kemarin ka- tika menutup Penataran Per- nalatan Para di Bidang Ke- tuwaan yang telah berlangsung sel- ma sebelas hari.

Melaporkan itu, sebagai reali- sasi keribadannya antara Depart- emen Agama dengan PWI Jaya dikaiti oleh 71 orang wartawan dari surat- surat buktola, ha- lah dan kantor- kantor yang ada di Jakarta. Sebelum dipi- ketik dituliskan pada kemas- ran itu oleh Pejabat- Pejabat De- partemen Agama, antara lain masalah Visualisasi Kebahap- an Agama, Perbandingan Ag- ama, Peradilan dan masalah yg menyuguhkan keragaman hidup keagamaan di Indonesia.

Menteri Mukti Ali dalam ke- sempatan kemarin itu menyam- pikan mengemukakan pendapatnya bahwa aparat Dep. Agama se- pengal lembaga kebetulip dalam melaksanakan tugasnya tidak begitu banyak dilaksanakan yang baik, tetapi para- lah yang baik, tetapi para- lah yang baik.

"Jika keribadannya, demikian Menteri" kami mengharap- kan dengan sangat kritiklah kami, karena dengan ber- tuk keribadannya kritik itu, de- partemen Agama akan sama- sia baik".

Hadir dan memberikan eva- luasi terhadap penataran itu al. Ketua PWI Pusat H. Ro- sidihan Atmaja, Ketua PWI Ja- nya Harsono dan Pejabat- Pejabat Departemen Agama.

Menteri Agama pada ke- sempatan itu telah mengper- bahas secara sederhana masalah Tawakal Pengharapan kepada para peserta. (D-48)

N A.S. LYNDON
N MENINGGAL

MENTERI AGAMA PROF. MUKTI ALI :

PEMIMPIN HARUS BERANI ADAKAN EKSPERIMEN

Jakarta, 10 April (Abadi) - Menteri Agama Prof. Mukti Ali mengemukakan kepada pejabat Departemen Agama di daerah agar bersel melakukan eksperimen sosial yang belum pernah dilaksanakan, orang-orang sebagai pembaharuan dengan tugas yang dihadapinya.

Rai ini dikemukakan pada saat menerima M.H.O. Hadary, Drs. Bucharyya dan H. Beni di hadapan pejabat Kepala Perwakilan Dep. Agama, Kepala Inspeksi Pendidikan Agama dan Kepala Inspeksi Pendidikan Agama DKI Jakarta pada pagi di Balai Kota.

Menteri menyatakan bahwa Kepala Perwakilan Dep. Agama di daerah adalah sebagai wakil Menteri Agama di daerah masing-masing dan sekaligus juga sebagai pemimpin masyarakat setempat. Ia menuntut Menteri sudah meng-

ambil langkah karena ia para pemimpin harus mampu menginisiasinya dan berakap di antara para Kepala Perwakilan Dep. Agama di daerah daerah untuk selalu mengabdikan perkembangan zaman, jangan membaca buku dan membaca saja gerak di antara kehidupan masyarakat. Diakatakan bahwa bagi seorang pemimpin yang baik harus mampu menginisiasikan masyarakat (ia memiliki tugas sebagai pemimpin) dari masyarakat.

Untuk mencapai tujuan pekerjaan yang diabdikan Menteri di inspeksi agar pejabat Dep. Agama di daerah itu selalu mengadakan komunikasi dengan Gubernur sebagai pemimpin tertinggi di daerah, untuk pada hakikatnya sebagai Kepala Perwakilan Dep. Agama adalah penasehat Gubernur di bidang keagamaan (B-24)

Kemudian dengan Gubernur

Sumbangan Pem. S. Arabia Untuk RS Ibnu Sina Bukittinggi

Jakarta, 10 April (Abadi). Dalam suatu upacara sederhana bertempat di Klubus Kerjasama Saudi Arabia Jl. Imam Burjoi Jakarta, Senin sore kemarin telah diserahkan sumbangan Penderitaan di Arabia untuk pembangunan Rumah Sakit Ibnu Sina Bukittinggi.

Tujuan S. Arabia Syiah di

rumah Bur mnyerahkan sumbangan itu berupa cek se jumlah US \$ 80,400,00 (Rp. 21.850.000) kepada Menteri Agama Prof. Dr. H. A. Mukti Ali dengan permintaan untuk diserahkan kepada Panitia Pembangunan. Itu pada waktu itu juga sumbangan lain oleh Menteri Agama di diserahkan kepada Panitia yg

INSTRUKSI PRESIDEN KPD, MENTERI AGAMA

Teruskan Lobbying R. U. U. Perkawinan

Presiden meminta agar seluruh jajaran KPD dan seluruh jajaran KADK terus melanjutkan lobi-lobbying terhadap DPR dan DPRD untuk mempercepat pembahasan R. U. U. Perkawinan.

Presiden juga meminta agar seluruh jajaran KPD dan seluruh jajaran KADK terus melanjutkan lobi-lobbying terhadap DPR dan DPRD untuk mempercepat pembahasan R. U. U. Perkawinan.

Menag meminta agar seluruh jajaran KPD dan seluruh jajaran KADK terus melanjutkan lobi-lobbying terhadap DPR dan DPRD untuk mempercepat pembahasan R. U. U. Perkawinan.

Menag juga meminta agar seluruh jajaran KPD dan seluruh jajaran KADK terus melanjutkan lobi-lobbying terhadap DPR dan DPRD untuk mempercepat pembahasan R. U. U. Perkawinan.

Menag meminta agar seluruh jajaran KPD dan seluruh jajaran KADK terus melanjutkan lobi-lobbying terhadap DPR dan DPRD untuk mempercepat pembahasan R. U. U. Perkawinan.

Menag juga meminta agar seluruh jajaran KPD dan seluruh jajaran KADK terus melanjutkan lobi-lobbying terhadap DPR dan DPRD untuk mempercepat pembahasan R. U. U. Perkawinan.

IMPAI KEMARIN SUDAH 13 ORANG PEMUDA ISLAM YANG DITAHAN

FORUM Islamiah, Jakarta, 10 Sept (Koran Abadi) - Para pemuda Islam yang ditahan di penjara di Jakarta, 10 Sept, telah mengadakan pertemuan di rumah salah satu narapidana di Penjara Banteng, Jakarta, untuk membahas masalah mereka.

Para pemuda Islam yang ditahan di penjara di Jakarta, 10 Sept, telah mengadakan pertemuan di rumah salah satu narapidana di Penjara Banteng, Jakarta, untuk membahas masalah mereka.

Pembahasan RUU-P Ditugaskan Kepada Komisi III Dan IX DPR

Presiden meminta agar seluruh jajaran KPD dan seluruh jajaran KADK terus melanjutkan lobi-lobbying terhadap DPR dan DPRD untuk mempercepat pembahasan R. U. U. Perkawinan.

Presiden juga meminta agar seluruh jajaran KPD dan seluruh jajaran KADK terus melanjutkan lobi-lobbying terhadap DPR dan DPRD untuk mempercepat pembahasan R. U. U. Perkawinan.

Menag meminta agar seluruh jajaran KPD dan seluruh jajaran KADK terus melanjutkan lobi-lobbying terhadap DPR dan DPRD untuk mempercepat pembahasan R. U. U. Perkawinan.

Menag juga meminta agar seluruh jajaran KPD dan seluruh jajaran KADK terus melanjutkan lobi-lobbying terhadap DPR dan DPRD untuk mempercepat pembahasan R. U. U. Perkawinan.

Menag meminta agar seluruh jajaran KPD dan seluruh jajaran KADK terus melanjutkan lobi-lobbying terhadap DPR dan DPRD untuk mempercepat pembahasan R. U. U. Perkawinan.

Menag juga meminta agar seluruh jajaran KPD dan seluruh jajaran KADK terus melanjutkan lobi-lobbying terhadap DPR dan DPRD untuk mempercepat pembahasan R. U. U. Perkawinan.

Menag meminta agar seluruh jajaran KPD dan seluruh jajaran KADK terus melanjutkan lobi-lobbying terhadap DPR dan DPRD untuk mempercepat pembahasan R. U. U. Perkawinan.

Menag juga meminta agar seluruh jajaran KPD dan seluruh jajaran KADK terus melanjutkan lobi-lobbying terhadap DPR dan DPRD untuk mempercepat pembahasan R. U. U. Perkawinan.